

***SPLIT-TICKET VOTING* PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF  
DPR RI – DPRD PROVINSI TAHUN 2019 DI KOTA MAKASSAR**

**Split-Ticket Voting in Legislative General Election of the House of  
Representatives of the Republic of Indonesia – the Provincial House  
of Representatives of 2019 in Makassar City**

**ABD. KAHAR MUZAKKIR  
E052172005**



**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

***SPLIT-TICKET VOTING* PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF  
DPR RI – DPRD PROVINSI TAHUN 2019 DI KOTA MAKASSAR**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Politik

Disusun dan diajukan oleh

ABD. KAHAR MUZAKKIR

E052172005

Kepada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**SPLIT-TICKET VOTING PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF  
DPR RI – DPRD PROVINSI TAHUN 2019 DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**ABD. KAHAR MUZAKKIR**

E052172005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **24 Januari 2022**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

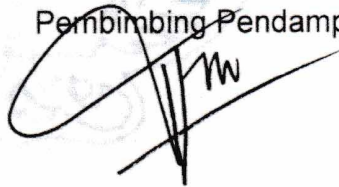
Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Muhammad, S.I.P., M.Si.  
Nip. 19710917 199703 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Gustiana A. Kambo, S.I.P., M.Si.  
Nip. 19730813 199803 2 001

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,



Dr. Ariana Yunus, S.I.P., M.Si.  
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.  
Nip. 19651109 199103 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Kahar Muzakkir

Nomor Pokok Mahasiswa : E052172005

Program Studi : (S2) Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “***Split-Ticket Voting*** pada Pemilihan Umum Legislatif DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar” merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat atau karya tulis orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



**Abd. Kahar Muzakkir**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua senantiasa dalam lindungan-Nya. Shalawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan universalitas pengetahuan, sehingga tesis yang berjudul “***Split-Ticket Voting* pada Pemilihan Umum Legislatif DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar**” dapat terselesaikan.

Penyusunan tesis merupakan salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis sangat menyadari bahwa baik dari segi teknik penulisan maupun substansi tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan konten tesis ini.

Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan saat mulai mengumpulkan literatur, menganalisis data, hingga tahap penyelesaian penulisan. Namun kesabaran dan ketekunan dilandasi oleh rasa tanggung jawab sebagai mahasiswa serta keterlibatan dan bantuan baik materil maupun moril dari

berbagai pihak, maka tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk pertama kalinya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibunda Naida Beta dan ayahanda Masnur Latif. Mereka tidak pernah berhenti menyanangi dan mendoakan yang terbaik untuk keselamatan, kesehatan, dan kesuksesan penulis dalam mengarungi samudra kehidupan.

Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh Wakil dan stafnya;
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh Wakil dan stafnya. Selain itu, Beliau juga selaku Penguji Sidang Tesis;
3. Ibu Dr. Ariana Yunus, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf pengajarnya;
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.I.P., M.Si., selaku Pembimbing Utama Penulis;
5. Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.I.P., M.Si., selaku Pembimbing Pendamping Penulis;
6. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si., serta Ibu Dr. Sakinah, M.Si., selaku Penguji Sidang Tesis;
7. Bapak Akmal dan Ibu Hamdah Ali, selaku Mertua Penulis;

8. Gulbudin Hikmatyar, Azhari Ramadhan, Wahyu Usama, Atika Kurnia Sari, Syaiful, dan Salman, selaku Saudara Penulis;
9. Saudara(i) Ipar Penulis;
10. Uun Andriang, Syaiful Ambri, beserta teman-teman seperjuangan di LSM SIGn Institute yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
11. Hasbullah, Andi Tenri Ajeng, beserta pihak-pihak yang turut serta membantu dan memberikan informasi terkait data penelitian yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
12. Sri Arjuna Razak, Hardiansyah, Miftahul khiyarah, dan Siti Hardianty, selaku rekan seangkatan pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
13. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, dimana mereka semua turut andil dalam memberi bantuan berupa gagasan, motivasi, dan do'a dalam proses-proses penyusunan tesis ini.

Ucapan terspesial kepada istri tercinta Nurul Fauziah, serta Ananda Alifah Kirana Maulida dan Rania Kaysha Maritza yang senantiasa menemani dan menghibur Penulis baik di saat suka maupun duka.

Selain itu, Penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga selesainya studi Penulis. Semua itu adalah murni dari Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus Ilmu Politik. Selain itu, penulis juga berharap hasil tesis ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin! Sekian dan terimakasih.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 2 Februari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kahar Muzakkir', written in a cursive style.

**Abd. Kahar Muzakkir**



## ABSTRAK

**ABD. KAHAR MUZAKKIR.** *Split-Ticket Voting pada Pemilihan Umum Legislatif DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar* (dibimbing oleh **Muhammad** dan **Gustiana A. Kambo**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dan model pemilih membagi suaranya kepada partai politik yang berbeda antara DPR RI dengan DPRD Provinsi pada Pileg 2019 di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan bersifat empirik guna mendeskripsikan objek dan subjek penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan perilaku memilih dan *split-ticket voting*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pemilih membagi suaranya kepada Partai Politik yang berbeda antara DPR RI dengan DPRD Provinsi pada Pileg 2019 di Kota Makassar terdiri dari faktor eksternal pemilih dan faktor internal pemilih. Faktor eksternal pemilih terdiri dari pola tandem, ketersediaan kandidat, biaya partisipasi dan gaya kampanye. Sementara faktor internal pemilih terdiri dari kekuatan keberpihakan, informasi jabatan, *strategic/policy balancing* dan kampanye/sosialisasi. Dengan demikian, motif tulus menjadi lebih dominan bagi pemilih, sedangkan secara minoritas terdapat arah *split-ticket voting* motif strategis. Akan tetapi, dengan rendahnya *Party ID*, Dominasi pola *candidate-centered*, serta *money politic* tinggi mengakibatkan motif dan model *split-ticket voting* menjadi bias. Adapun model *split-ticket voting* yang paling mendekati adalah model *low information*, namun dengan beberapa catatan kritis. Pertama, pemilih di Kota Makassar cukup memahami informasi parpol/kandidat sesuai yang hadir di wilayahnya dengan maraknya gosip-gosip politik yang dikoordinasikan oleh simpul politik sehingga klaim 'kebingungan pemilih' tidak sesuai. Kedua, secara kualitatif penelitian ini memfokuskan tidak hanya dari sisi faktor pemilih, namun juga sisi faktor parpol dengan perspektif koordinasi, sedangkan model *low information* secara kuantitatif fokus pada faktor pemilih saja sehingga kurang menekankan peran elit dan simpul politik dalam melakukan koordinasi pileg.

**Kata kunci:** Calon Legislatif, Koordinasi Strategis, Pemilih, Pemilihan Umum, Split-Ticket Voting.



## ABSTRACT

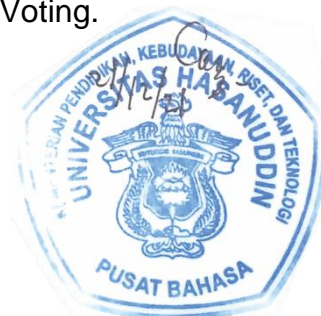
**ABD. KAHAR MUZAKKIR.** *Split-Ticket Voting in Legislative General Election of the House of Representatives of the Republic of Indonesia – the Provincial House of Representatives of 2019 in Makassar City* (supervised by **Muhammad** and **Gustiana A. Kambo**).

This study analyzes the factors and models of voters dividing their votes to different political parties between the House of Representatives and the Provincial House of Representatives in the Legislative General Election of 2019 in Makassar City.

This research was conducted in Makassar City. This type of research is descriptive qualitative. The data used are empirical to describe the object and subject of this research. Data was collected through interviews and documentation studies. The data were analyzed using a voting behavior approach and split-ticket voting.

The results of the study indicate that the factors that cause voters to divide their votes to different political parties between the House of Representatives and the Provincial House of Representatives in the Legislative General Election of 2019 in Makassar City consist of external and internal factors of voters. Voters' external factors include a tandem pattern, candidate availability, participation costs, and campaign style. Meanwhile, the voters' internal factors include the strength of alignments, information about the position, strategic/policy balancing, and campaigns/socialization. Thus, sincere motives become more dominant for voters, while in the minority, there is a split-ticket voting direction with strategic motives. However, with the low Party ID, the dominance of candidate-centered patterns, and high money politics, the motives, and models of split-ticket voting are biased. The split-ticket voting model that is the closest is the low information model, but with some critical notes. First, voters in Makassar City understand enough information about political parties/candidates according to those present in their area with the rise of political gossip coordinated by political nodes. The claim of 'voter confusion' is not appropriate. Second, qualitatively, this study focuses on the voters' factor and the political party factors with a coordination perspective. In contrast, the low information model quantitatively focuses on voters' factors so that it does not emphasize the role of elites and political nodes in coordinating the Legislative General Election.

**Keywords:** Legislative Candidates, Strategic Coordination, Voters, General Elections, Split-Ticket Voting.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Pernyataan Keaslian Tesis .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1 Manfaat Akademis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Pendekatan Perilaku Memilih .....	14
2.1.1 Pendekatan Sosiologis.....	15
2.1.2 Pendekatan Psikologis .....	17
2.1.3 Pendekatan Rasional .....	18

2.1.4 Pendekatan Domain Kognitif ( <i>Marketing</i> ).....	19
2.2 Konsep <i>Split-Ticket Voting</i> .....	21
2.2.1 Faktor-Faktor <i>Split-Ticket Voting</i> .....	23
2.2.2 Motif <i>Split-Ticket Voting</i> .....	56
2.2.3 Model <i>Split-Ticket Voting: Low Information</i> .....	63
2.3 Penelitian yang Relevan .....	70
2.4 Kerangka Pikir.....	77
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>83</b>
3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian .....	83
3.2 Lokasi Penelitian.....	85
3.3 Fokus Penelitian .....	85
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	86
3.4.1 Wawancara .....	87
3.4.2 Studi Dokumentasi .....	94
3.5 Teknik Analisis Data .....	94
3.5.1 Reduksi Data.....	95
3.5.2 Display/Sajian Data .....	96
3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi .....	97
3.6 Pengabsahan Data .....	98
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>99</b>
4.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kota Makassar.....	99
4.2 Hasil Perolehan Suara DPR RI dan DPRD Provinsi pada Pemilu 2019 di Kota Makassar .....	103

<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>109</b>
5.1 Alasan Pemilih Membagi Suaranya kepada Partai Politik yang Berbeda antara DPR RI dengan DPRD Provinsi pada Pileg 2019 di Kota Makassar .....	109
5.1.1 Faktor-Faktor Pemilih Membagi Suaranya kepada Partai Politik yang Berbeda antara DPR RI dengan DPRD Provinsi.....	109
5.1.2 Motif Pemilih Membagi Suaranya kepada Partai Politik yang Berbeda antara DPR RI dengan DPRD Provinsi .....	168
5.2 Model Pemilih Membagi Suaranya kepada Partai Politik yang Berbeda antara DPR RI dengan DPRD Provinsi pada Pileg 2019 di Kota Makassar .....	180
5.3 Implikasi Teori Pemilih Membagi Suaranya kepada Partai Politik yang Berbeda antara DPR RI dengan DPRD Provinsi pada Pileg 2019 di Kota Makassar.....	186
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>206</b>
6.1 Kesimpulan .....	206
6.2 Saran .....	207
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>210</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase <i>Split-Ticket Voting</i> berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 dengan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1 – 4 .	4
Tabel 1.2	Persentase <i>Split-Ticket Voting</i> Legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 dengan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1 – 2 Kota Makassar Berdasarkan Partai Politik yang Memperoleh Kursi DPR RI .....	8
Tabel 2.1	Fenomena <i>Split-Ticket Voting</i> dalam Pendekatan Koordinasi Strategis Level Individu .....	48
Tabel 2.2	Perbandingan antar Penelitian.....	76
Tabel 4.1	Daftar Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2019 di Kota Makassar .....	99
Tabel 4.2	Daftar Jumlah Penduduk Tahun 2019 di Kota Makassar	100
Tabel 4.3	Gambaran Umum Pekerjaan Penduduk Tahun 2019 di Kota Makassar.....	101
Tabel 4.4	Status Pekerjaan berdasarkan Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2019 di Kota Makassar .....	102
Tabel 4.5	Agama/Keyakinan Penduduk Tahun 2019 di Kota Makassar .....	103

Tabel 4.6	Daftar Pemilih, TPS, dan Perolehan Suara Sah Pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar .....	104
Tabel 4.7	Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR RI Tahun 2019 di Kota Makassar .....	105
Tabel 4.8	Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 di Kota Makassar .....	106
Tabel 4.9	<i>Split-Ticket Voting</i> antara Partai Politik Peserta Pemilu DPR RI dengan DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar .....	107
Tabel 5.1	<i>Split-Ticket Voting</i> Berdasarkan Faktor Eksternal Pemilih antara DPRD RI Sulsel 1 dengan DPRD Provinsi Pileg 2019 di Kota Makassar .....	111
Tabel 5.2	<i>Split-Ticket Voting</i> Partai Politik Baru antara DPR RI Sulsel 1 dengan DPRD Provinsi Pileg 2019 Khusus Kota Makassar .....	117
Tabel 5.3	Efek Ekor Jas Melalui <i>Split-Ticket Voting</i> antara Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan DPR RI Partai Pengusung & Pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin Pemilu 2019 di Kota Makassar .....	119
Tabel 5.4	Efek Ekor Jas Melalui <i>Split-Ticket Voting</i> antara Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga	

	Uno dengan DPR RI Partai Pengusung & Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Pemilu 2019 di Kota Makassar .....	121
Tabel 5.5	Konsolidasi Kekuatan Partai Nasdem untuk DPR RI Dapil Sulsel 1 Pileg 2019 .....	142
Tabel 5.6	<i>Split-Ticket Voting</i> Berdasarkan Faktor Pemilih antara DPRD RI Sulsel 1 dengan DPRD Provinsi Pileg 2019 di Kota Makassar .....	149
Tabel 5.7	Kedekatan Pemilih dengan Partai Politik berdasarkan <i>Split-Ticket Voting</i> antara DPR RI dengan DPRD Provinsi Pileg 2019 di Kota Makassar .....	151
Tabel 5.8	Pengungkapan Motif & Bias <i>Split-Ticket Voting</i> antara DPRD RI Sulsel 1 dengan DPRD Provinsi Pileg 2019 di Kota Makassar .....	169
Tabel 5.9	Implikasi Teori Faktor-Faktor <i>Split-Ticket Voting</i> antara DPRD RI Sulsel 1 dengan DPRD Provinsi Pileg 2019 di Kota Makassar .....	187



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pemikiran.....	82
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data .....	95
Gambar 5.1 Model <i>Split-Ticket Voting</i> antara DPR RI dengan DPRD Provinsi di Kota Makassar .....	181

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilu secara langsung di masa reformasi sekarang ini merupakan perwujudan demokrasi untuk menghasilkan wakil rakyat baik lingkup kekuasaan eksekutif maupun legislatif melalui serangkaian mekanisme tertentu dan didasarkan pada sistem *Proportional Representation* (PR).<sup>1</sup> Sistem ini menghendaki multipartai, dalam artian memberikan ruang lebih bagi Partai Politik (Parpol) untuk terlibat dalam proses pemilu.

Nilai-nilai yang senantiasa disosialisasikan oleh Parpol akan membentuk dukungan yang kuat dari masyarakat, sehingga mempunyai efek menurun di berbagai tingkatan dalam perolehan suara. Artinya, memberikan kemudahan dalam menganalisis perolehan suara dan jalannya proses Pemilu. Namun pada kenyataannya tidak semudah itu. Parpol harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan kerjasama yang terukur untuk dapat menghubungkan di berbagai lingkup kekuasaan dan di berbagai tingkatan dalam hal perolehan suara. Di sisi lain, warga negara sebagai Pemilih memiliki kebebasan mutlak untuk memilih calon pemimpin yang mereka kehendaki.

---

<sup>1</sup>Sistem *Proporsional Representation* menjelaskan tentang proporsi kursi yang dimenangkan oleh Partai Politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Lihat Editorial. (2018). *Rumah Pintar Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hlm. 6.

Pada posisi ini, Parpol senantiasa selalu mempertahankan Pemilih pendukungnya, termasuk keselarasan pemilihnya dalam memilih di lingkup kekuasaan dan/atau tingkatan berbeda. Dengan demikian, Parpol menginginkan *straight-ticket voting* dan semaksimal mungkin meminimalkan *split-ticket voting*. Fenomena perilaku pemilih membagi suaranya kepada Parpol yang berbeda pada Pemilu di lingkup kekuasaan dan/atau tingkatan berbeda inilah disebut *split-ticket voting*.

Fenomena *split-ticket voting* memberikan analisis yang cukup memadai untuk melihat kinerja Parpol dan menghubungkannya di berbagai lingkup kekuasaan dan di berbagai tingkatan dalam hal perolehan suara. Asumsi dasarnya jelas, Parpol sebagai organisasi harus mampu menangkap kemauan warga negara dan mengkonsolidasikannya di lingkup internal sehingga fenomena *split-ticket voting* dapat ditekan.

Beberapa motif *split-ticket voting* yang umumnya menjadi landasan dari berbagai penelitian, seperti motif tulus (*sincere motives*) dan motif strategis (*strategic motives*). Motif tulus dalam fenomena *split-ticket voting* lebih mencerminkan dukungan yang tulus, tetapi tetap terbagi terhadap banyak partai atau kandidat. Artinya, Pemilih membagi suaranya di Parpol yang berbeda bahwa di lingkup kekuasaan yang satu, Pemilih tetap mempertahankan dukungannya karena menyukai identitas Parpol, namun di lingkup kekuasaan lainnya, Pemilih dengan tulus lebih mendukung kandidat selain dari Parpol yang disukainya karena lebih menyukai kandidat Parpol tersebut dibanding kandidat yang tersedia di Parpol yang

disukainya. Berbeda dengan motif strategis, Pemilih tetap mempertahankan suaranya untuk Parpol yang disukainya di lingkup kekuasaan yang satu, sementara di lingkup kekuasaan lainnya, Pemilih pada akhirnya meninggalkan dukungan kandidat dari Parpol yang disukainya dan lebih memilih kandidat dari Parpol yang kurang disukainya dengan alasan strategis.

Titik tekan dari fenomena *split-ticket voting*, jika dilihat dari berbagai motif dan model yang berkembang dewasa ini adalah kedekatan Pemilih dengan identitas Parpol yang menjadi ciri khasnya. Misalnya, sistem pluralitas/mayoritas ataupun sistem campuran antara sistem pluralitas dengan sistem *Proporsional Representation* (PR) memberikan ruang untuk mengkaji lebih mendalam mengenai fenomena *split-ticket voting* yang terjadi dikalangan Pemilih. Asumsi dasarnya adalah sesuai Hukum Duverger bahwa pada sistem pluralitas/mayoritas akan membentuk sistem dua partai sehingga menempatkan Parpol pada posisi yang penting dan secara otomatis, Parpol akan berkembang lebih pada penampakan identitas ataupun isu khas yang lebih dominan di mata Pemilih. Parpol juga lebih mengedepan kualitas kandidat yang didorong bertarung di Pemilu untuk berbagai lingkup kekuasaan. Pada posisi ini, *split-ticket voting* mendapatkan makna untuk dikaji lebih mendalam karena motif dominan terungkap dengan jelas ketika Pemilih membagi suaranya untuk Parpol yang berbeda di lingkup kekuasaan yang berbeda.

Kondisi ini tampaknya berbeda pada negara yang menganut sistem PR murni seperti di Indonesia. Sesuai hipotesis Duverger bahwa pada Sistem PR akan cenderung membentuk sistem multipartai. Seperti yang terjadi di Indonesia, Sistem PR telah sampai pada persaingan multipartai. Sementara di sisi lain, identitas Parpol semakin kabur di mata Pemilih, ditambah lagi politik uang yang semakin marak. Dua hal terakhir ini, bukanlah hal yang baru dan telah menjadi rahasia umum bagi Pemilih di Indonesia.

Posisi ini menempatkan kerumitan tersendiri dalam menggambarkan *split-ticket voting* di Indonesia, apalagi di masa sekarang di bawah Sistem *Open-List Proportional Representation*. Ketika Pemilih membagi suaranya untuk lingkup kekuasaan yang berbeda semata-mata karena alasan kandidat, maka teori *split-ticket voting* kehilangan makna karena penanda utamanya adalah Parpol itu sendiri. Sementara telah menjadi hal yang umum jika dikatakan sistem multipartai cenderung membuat identitas Parpol menjadi kabur.

Pada konteks Indonesia, penelitian mengenai *split-ticket voting* pertama kali dilakukan oleh Muhammad Qodari (2016) yang disebut dengan Model *Low Information*. Pertama, *partisanship (party ID)* yang rendah. Parpol di Indonesia tidak memiliki identitas yang kuat. Hal ini terlihat dari konsistensi dan kekhasan isu yang diangkat oleh Parpol di Indonesia yang hampir sangat kecil. Kedua, evaluasi positif calon kandidat. Gabungan antara rendahnya identitas Parpol dan evaluasi

positif Pemilih terhadap kandidat dari partai lain menjadi penyebab munculnya fenomena *split-ticket voting* di Indonesia.

Fenomena ini hendaknya dianalisis secara kualitatif mengingat landasan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qodari adalah kuantitatif sehingga kurang detail menggambarkan perbedaan makna umum tindakan Pemilih yang membagi suaranya dengan makna tindakan Pemilih membagi suaranya berdasarkan teori *split-ticket voting*.

Hasil observasi dan studi dokumentasi Peneliti menemukan bahwa kecenderungan penelitian tentang *split-ticket voting* di Indonesia terjadi pada lingkup kekuasaan berbeda dan di waktu yang berbeda. Sementara itu, Peneliti belum menemukan penelitian tentang fenomena *split-ticket voting* pada lingkup kekuasaan yang sama dan di waktu yang sama. Oleh karena itu, Peneliti tertarik menganalisis fenomena tersebut pada Pileg tahun 2019 antara DPR RI dengan DPRD Provinsi.

Ketertarikan Peneliti lebih jauh jatuh pada fenomena *split-ticket voting* pada Pemilu 2019 antara tingkat DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 dengan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1 – 4. Sebagai tahap awal, Peneliti menampilkan data persentase *split-ticket voting* berdasarkan hasil perolehan suara antara kedua tingkatan tersebut.

**Tabel 1.1 Persentase *Split-Ticket Voting* berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 dengan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1 – 4**

No. Urut	Peserta Pemilu	Makassar	Gowa	Takalar	Jeneponto	Bantaeng	Selayar
1	PKB	13,06%	25,95%	46,02%	15,15%	38,63%	40,67%
2	P. Gerindra	17,06%	12,64%	60,77%	40,85%	39,58%	35,07%
3	PDIP	27,88%	31,07%	26,49%	18,25%	55,15%	38,50%
4	P. Golkar	24,89%	17,67%	30,51%	51,92%	18,52%	27,98%
5	P. NasDem	36,74%	6,77%	33,23%	26,36%	39,73%	18,65%
6	P. Garuda	10,32%	18,30%	16,79%	15,89%	7,26%	0,00%
7	P. Berkarya	12,96%	40,86%	12,80%	8,93%	2,01%	40,12%
8	PKS	8,52%	38,67%	35,94%	43,95%	2,42%	62,92%
9	Perindo	49,62%	31,22%	35,60%	41,17%	15,54%	4,40%
10	PPP	26,81%	48,59%	28,62%	17,23%	56,73%	57,31%
11	PSI	20,27%	34,37%	34,46%	70,45%	80,44%	55,07%
12	PAN	28,31%	21,83%	8,46%	55,83%	30,25%	40,10%
13	P. Hanura	66,17%	74,52%	16,96%	44,30%	63,64%	21,81%
14	P. Demokrat	29,28%	29,96%	53,90%	63,22%	44,42%	69,02%
19	PBB	53,93%	46,56%	54,25%	33,61%	11,09%	24,45%
20	PKPI	31,83%	77,69%	51,56%	54,99%	100,00%	72,67%

Sumber: Data diolah dari Rekapitulasi Model DC1, KPUD Provinsi Sulawesi Selatan, (2019).

Tabel 1.1 menampilkan persentase *split-ticket voting* berdasarkan hasil perolehan suara antara tingkat DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 dengan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1 – 4. Secara umum, Pemilih yang melakukan *ticket-splitting* cukup besar di hampir semua Kabutapen/Kota di Dapil Sulawesi Selatan 1. Analisis tentunya menjadi menarik jika difokuskan pada Parpol yang mendapatkan kursi.

Berdasarkan Tabel 1.1, jika merujuk pada Parpol yang mendapatkan kursi, maka untuk wilayah Kota Makassar dominan *split-ticket voting* berada di bawah angka 30% kecuali untuk Partai Nasdem (36,74%). Kabupaten Gowa dominan di bawah 30% kecuali PDIP

(31,07%), PPP (48,59%). Kabupaten Takalar dominan di atas 30% dengan angka tertinggi Partai Gerindra (60,77%). Kabupaten Jeneponto angka di bawah 30% dan di atas 30% berimbang dengan angka tertinggi Partai Demokrat (63,22%). Kabupaten Bantaeng dominan di atas 30%, hanya satu yang berada di bawah 30%, yaitu Partai Golkar (18,52%). Kabupaten Selayar dominan di atas 30%, terdapat dua Parpol yang berada di bawah 30%, yaitu Partai Golkar (27,98%) dan Partai Nasdem (18,65%).

Jika diperhatikan secara umum, maka tampak persentase *split-ticket voting* dominan tinggi di wilayah Kabupaten jika dibandingkan Kota Makassar. Namun jika melihat jumlah pemilih yang melakukan *ticket-splitting*, maka Kota Makassar tetap yang tertinggi. Hal ini sesuai dengan faktor demografis yang juga mempengaruhi *split-ticket voting*. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan menganalisis *split-ticket voting* untuk wilayah Kota Makassar.

Kota Makassar melingkupi dua Dapil pada Pileg DPRD Provinsi, yakni Dapil Sulawesi Selatan 1 dan Dapil Sulawesi Selatan 2. Berikut Peneliti menyajikan data persentase *split-ticket voting* berdasarkan hasil perolehan suara antara tingkat DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 dengan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1 – 2 di Kota Makassar.



**Tabel 1.2 Persentase *Split-Ticket Voting* Legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 dengan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1 – 2 Kota Makassar Berdasarkan Partai Politik yang Memperoleh Kursi DPR RI**

No. Urut	Peserta Pemilu	Makassar A		Makassar B	
		F	%	F	%
1	PKB	2.842	11,75%	6.716	59,32%
2	P. Gerindra	11.308	19,56%	5.739	13,21%
3	PDIP	11.019	28,34%	8.041	27,19%
4	P. Golkar	3.523	8,76%	14.891	33,49%
5	P. NasDem	51.740	51,11%	2.478	6,33%
6	PPP	7.015	23,91%	4.372	29,46%
7	PAN	11.470	38,09%	2.584	12,47%
8	P. Demokrat	14.706	34,62%	5.547	20,44%

Sumber: Data diolah dari Rekapitulasi Model DA1, KPUD Kota Makassar, 2019.

Pada Tabel 1.2, Peneliti memfokuskan gambaran persentase *split-ticket voting* di Kota Makassar berdasarkan Parpol yang memperoleh kursi DPR RI. Perolehan kursi DPR RI menjadi tolak ukur karena merupakan lingkup kekuasaan yang lebih tinggi jika dibandingkan DPRD Provinsi. Terdapat 8 (delapan) Parpol yang memperoleh kursi di DPR RI Sulawesi Selatan 1 (tak ada satupun Parpol yang memperoleh lebih dari 1 kursi).

Berdasarkan tabel 1.2, Peneliti menampilkan persentase *split-ticket voting* untuk kedua dapil tersebut. Persentase *split-ticket voting* PKB untuk wilayah Makassar A terbilang rendah, yaitu 11,75%, namun cukup tinggi untuk wilayah Makassar B, yaitu 59,32%. Persentase *split-ticket voting* Partai Gerindra terbilang cukup rendah, yaitu 19,56% untuk Makassar A dan 13,21% untuk Makassar B. Persentase *split-ticket voting* PDIP berada di bawah angka 30%, namun juga mendekati angka 30%, yaitu 28,34%

untuk Makassar A dan 27,19% untuk Makassar B. Oleh karena, untuk PDIP terbilang mendekati kategori *split-ticket voting* yang tinggi.

Persentase *split-ticket voting* Partai Golkar untuk wilayah Makassar A terbilang rendah, yaitu 8,76%, namun cukup tinggi untuk wilayah Makassar B, yaitu 33,49%. Persentase *split-ticket voting* Partai Nasdem untuk wilayah Makassar A berada dalam kategori tinggi, yaitu 51,11%, namun sangat rendah untuk wilayah Makassar B, yaitu 6,33%. Persentase *split-ticket voting* PPP berada di bawah angka 30%, namun juga mendekati angka 30%, yaitu 23,91% untuk Makassar A dan 29,46% untuk Makassar B. Oleh karena, untuk PPP terbilang mendekati kategori *split-ticket voting* yang tinggi.

Persentase *split-ticket voting* PAN untuk wilayah Makassar A berada dalam kategori tinggi, yaitu 38,09%, namun cukup rendah untuk wilayah Makassar B, yaitu 12,47%. Begitupun dengan Persentase *split-ticket voting* Partai Demokrat untuk wilayah Makassar A berada dalam kategori tinggi, yaitu 34,62%, namun untuk wilayah Makassar B terbilang mendekati kategori *split-ticket voting* yang tinggi, yaitu 20,44%.

Hal yang cukup menarik untuk wilayah Kota Makassar (salah satu wilayah dari DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1) adalah Caleg terpilih dan mendapatkan kursi DPR RI juga merupakan pengurus di Parpol-nya masing-masing. Ashabul Kahfi yang terpilih sebagai anggota DPR RI merupakan Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan. H.M. Amir Uskara yang terpilih sebagai anggota DPR RI merupakan mantan Ketua DPW PPP

Sulawesi Selatan dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP. Hamka Baco Kady yang terpilih sebagai anggota DPR RI merupakan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar. Aliyah Mustika Ilham yang terpilih sebagai anggota DPR RI merupakan Ketua Departemen Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPP Partai Demokrat. Haruna yang terpilih sebagai anggota DPR RI merupakan Wakil Ketua Umum DPW PKB Sulawesi Selatan. Andi Ridwan Wittiri yang terpilih sebagai anggota DPR RI merupakan Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan. Azikin Zolthan yang terpilih sebagai anggota DPR RI merupakan Anggota Dewan Penasehat DPW Partai Gerindra Sulawesi Selatan.

Para Caleg yang terpilih tersebut mempunyai peranan penting dalam mengembangkan Parpol di wilayahnya masing-masing, sehingga cukup menarik untuk menganalisis lebih lanjut fenomena *split-ticket voting* pada Pileg 2019 di Kota Makassar. Fenomena *split-ticket voting* tentunya harus menjadi perhatian bagi para pengurus Parpol karena menjadi tolak ukur koordinasi antara pengurus Parpol, Caleg, dan masyarakat dalam rangka menciptakan *straight-ticket voting*.

Fenomena *split-ticket voting* juga menjadi menarik dianalisis untuk Parpol yang sudah lama mengikuti kontestasi Pemilu di Indonesia (setidaknya dua periode). Hal ini karena pendukung Parpol telah terbentuk dan mudah melakukan koordinasi untuk mencapai target kerja. Sementara itu, fenomena *split-ticket voting* menjadi kurang menarik dianalisis untuk Parpol yang tergolong baru, karena Caleg mereka lebih menonjolkan

aspek ketokohnya ketimbang berkoordinasi dengan Parpol. Artinya, persentase *split-ticket voting* sudah pasti tinggi untuk Parpol baru jika kandidatnya mendapatkan kursi dan menjadi anggota DPR.

Akhirnya, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk memilih, meneliti, dan membahas bahan penulisan tesis dengan judul:

***“Split-Ticket Voting pada Pemilihan Umum Legislatif  
DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Mengapa Pemilih membagi suaranya kepada Partai Politik yang berbeda antara DPR RI dengan DPRD Provinsi pada Pileg 2019 di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah model Pemilih membagi suaranya kepada Partai Politik yang berbeda antara DPR RI dengan DPRD Provinsi pada Pileg 2019 di Kota Makassar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor Pemilih membagi suaranya kepada Partai Politik yang berbeda antara DPR RI dengan DPRD Provinsi pada Pileg 2019 di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis model Pemilih membagi suaranya kepada Partai Politik yang berbeda antara DPR RI dengan DPRD Provinsi pada Pileg 2019 di Kota Makassar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

##### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Penelitian ini dapat menambah referensi di bidang politik, khususnya berkaitan dengan fenomena *split-ticket voting* pada Pemilu.
2. Penelitian ini dapat memberikan/menambah perbendaharaan pustaka.
3. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan Peneliti dan pembaca lainnya tentang fenomena *split-ticket voting*.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini menjadi masukan kepada para Caleg DPR di semua tingkatan dalam melakukan strategi pemenangan pada Pileg.
2. Penelitian ini menjadi masukan kepada para Pemilih untuk memastikan alasan dalam memilih Caleg DPR di semua tingkatan pada Pileg.

3. Penelitian ini menjadi masukan kepada Elit Partai Politik dalam memperkuat sistem pencalonan Kader Partainya.
4. Penelitian ini menjadi masukan kepada penyelenggara Pemilu dalam menyosialisasikan pentingnya menjadi Pemilih rasional kepada seluruh masyarakat wajib pilih.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pendekatan Perilaku Memilih

Perilaku memilih merupakan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).<sup>2</sup> Definisi ini dipersempit oleh Ramlan Surbakti bahwa perilaku memilih merupakan tindakan individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum.<sup>3</sup>

Definisi yang lebih luas dapat dilihat dari pandangan Samuel P. Huntington & Joan Nelson yang tidak memisahkan antara perilaku memilih dengan partisipasi politik karena wujud materialnya senantiasa berdampingan, misalnya aktivitas Pemilu yang mencakup pemberian suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, partisipasi tim pemenangan, atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses Pemilu.<sup>4</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perilaku memilih merupakan serangkaian tindakan pemilih yang erat kaitannya dengan

---

<sup>2</sup>Miriam Budiardjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 367.

<sup>3</sup>Ramlan Surbakti. (1997). *Partai, Pemilih dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 105.

<sup>4</sup>Samuel P. Huntington & Joan Nelson. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Terj. oleh Sahat Simamora). Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 127.

partisipasi politik untuk terlibat atau tidak terlibat dalam proses Pemilu guna menghadirkan para pemimpin, baik di lingkup kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Lebih jauh lagi, perilaku memilih tidak hanya dipahami tindakan mencoblos di bilik suara saja, namun juga berbagai aktivitas/kegiatan Pemilih baik dalam rangka memenangkan kandidatnya ataupun mensukseskan Pemilu.

Perilaku pemilih dapat dipahami berdasarkan beberapa pendekatan. Dennis Kavanagh (1983) menguraikan tiga pendekatan dalam mengkaji perilaku memilih, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis sosial, dan pendekatan rasional.<sup>5</sup> Sementara itu, Hermansyah Putra menguraikan empat pendekatan dalam mengkaji perilaku memilih, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional, dan pendekatan domain kognitif (*marketing*).<sup>6</sup>

### **2.1.1 Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis menurut Bernard R. Berelson., *et al.* (1954) menekankan bahwa perilaku memilih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis yang ditinjau dari sisi pranata sosial dan latar belakang sosial.<sup>7</sup> Sisi pranata sosial meliputi keluarga, tempat kerja, dan lingkungan

---

<sup>5</sup>Lihat Stepanus Devi Suhardian. (2016). "Persepsi Pemilih Pemula pada Pemilu 2014 di SMTA se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo". *Skripsi*. Universitas PGRI Yogyakarta, hlm. 51.

<sup>6</sup>Hermansyah Putra. (2020). "Perilaku Memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kota Sukabumi)". *Tesis*. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, hlm. 28.

<sup>7</sup>*Ibid.*, 28-29.



pergaulan. Sedangkan dari sisi latar belakang sosial meliputi agama, ekonomi, usia, pendidikan, suku, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Axl Papilaya & Restu Rahmawati dalam kesimpulan penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara agama, etnis, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Kalideres pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Adapun agama sebagai faktor yang signifikan dalam mempengaruhi Perilaku pemilih.<sup>8</sup>

Di sisi lain, Fadli Afriandi dalam kesimpulan penelitiannya mengungkapkan bahwa perilaku memilih masyarakat pasca runtuhnya dinasti kekuasaan Syaukani-Rita di Kutai Kartanegara adalah kembalinya pola perilaku memilih masyarakat di tingkat lokal menjadi primordial. Hal ini disebabkan karena masyarakat menilai telah kehilangan tokoh yang diyakini cakap untuk membawa Kalimantan Timur lebih baik. Dalam hal ini, Pemilih rasional bergeser kembali ke pola primordial.<sup>9</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh Frans Bapa Tokan yang menyimpulkan bahwa pilihan politik warga Kota Kupang terhadap dua pasang paket Walikota/Wakil Walikota pada Pilkada Kota Kupang 2017 masih cenderung berkarakter sosiologis. Dari total pilihan responden atas dua pasang paket tersebut, sebesar 63,50% masih dipengaruhi oleh

---

<sup>8</sup>Axl Papilaya & Restu Rahmawati. (2018). Pengaruh Pilihan Sosiologis terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kecamatan Kalideres Jakarta Barat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan (JIPP)*, Universitas Siliwangi, 4(1), hlm. 11.

<sup>9</sup>Fadli Afriandi. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat Pasca Runtuhnya Dinasti Kekuasaan di Kutai Kartanegara. *Jurnal Polgov*, Universitas Gadjah Mada, 1(1), hlm. 83-84.

kesamaan latar belakang sosiologis antara pemilih dengan calon pemimpinnya. Kenyataan tersebut menunjukkan kuatnya cengkeraman kultur sosial masyarakat yang terbentuk dari sentimen primordial, agama, daerah, dan suku ternyata lebih dominan daripada rasionalitas pemilih dalam memilih calon pemimpinnya.<sup>10</sup>

### **2.1.2 Pendekatan Psikologis**

Perilaku memilih berdasarkan pandangan Angus Campbell., *et al.* (1966) dipengaruhi oleh faktor-faktor dari rasa kedekatan dengan Parpol tertentu, meliputi identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu.<sup>11</sup> Faktor-faktor yang berlandaskan rasa kedekatan erat kaitannya dengan pendekatan psikologis dalam mengkaji perilaku memilih.

Pendekatan psikologis dapat dilihat berdasarkan hasil riset Gotfridus Goris Seran yang mengungkapkan bahwa faktor ketokohan calon, hubungan emosional, identifikasi partai, orientasi isu, dan peran media massa menjadi faktor-faktor penentu perilaku memilih dalam Pilpres 2014 di Kabupaten Bogor. Dari hasil identifikasi, ketokohan calon sebagai faktor yang sangat signifikan dalam mempengaruhi Perilaku pemilih.<sup>12</sup>

Kajian perilaku memilih dalam pendekatan psikologis juga dapat diamati sesuai masa perkembangan hidup Pemilih, misalnya riset yang

---

<sup>10</sup>Frans Bapa Tokan. (2019). Analisis Perilaku Memilih pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2017. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro*, 4(1), hlm. 50-51.

<sup>11</sup>Angus Campbell., *et al.* (1966). *Elections and the Political Order*. New York: John Wiley & Sons Ltd.

<sup>12</sup>Gotfridus Goris Seran. (2018). Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Perilaku Memilih dalam Pilpres 2014 di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora, Universitas Djuanda Bogor*, 9(2), hlm. 124-125.

dilakukan oleh Hertanto mengungkapkan bahwa mahasiswa cenderung memilih parpol yang pernah ikut dan menang pada Pemilu sebelumnya. Pilihan mahasiswa terhadap calon (legislatif, gubernur dan wakil gubernur) cenderung pada tokoh-tokoh yang sangat dikenal dan memiliki kedekatan emosional dengan para pemilih mahasiswa. Sesuai tahap perkembangan psikologis mahasiswa (masa awal dewasa-masa dewasa), perilaku memilih-nya karena faktor kebanggaan psikologis, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok, dan menunjukkan loyalitas terhadap partai.<sup>13</sup>

### 2.1.3 Pendekatan Rasional

Anthony Downs (1957), yang merupakan tokoh pendekatan rasional menekankan bahwa perilaku memilih dipengaruhi oleh faktor-faktor dari keadaan ekonomi dan evaluasi kinerja pemerintah yang dianggap baik.<sup>14</sup> Dalam hal ini, berlaku prinsip penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), khususnya bagi kandidat petahana (*incumbent*) beserta Parpol pengusungnya.

Riski Dwi Jayani dalam kesimpulannya mengungkapkan bahwa isu yang dibawa kandidat, program kandidat dan evaluasi kualitas kandidat, keseluruhannya menunjukkan adanya hubungan antara *rational choice* pilihan politik masyarakat Kota Surabaya pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2015. Hal ini menunjukkan perilaku memilih

---

<sup>13</sup>Hertanto H. (2015). Perilaku Memilih Mahasiswa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Lampung. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Universitas Negeri Jakarta*, 14(2), hlm. 42.

<sup>14</sup>Hermansyah Putra. (2020). *Op. Cit.*, hlm., 34-35.

masyarakat Kota Surabaya merupakan tipe pemilih rasional karena masing-masing individu mempunyai kemampuan untuk menimbang baik-buruk, ataupun keuntungan yang didapat ketika memilih salah satu pasangan kandidat tersebut.<sup>15</sup>

Di sisi lain, Melody E. Valdini & Michael S. Lewis-Beck mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi membantu meredam serangan bagi petahana. Meskipun tercatat bahwa hasil ini mungkin sangat tergantung pada fase demokratisasi yang saat ini terjadi di sebagian besar negara di Amerika Latin. Akhirnya, Presiden di Amerika Latin harus waspada pada sistem Pemilu untuk *second-round*. Mereka akan dihukum lebih berat karena ekonomi yang buruk pada *first-round* dan mungkin saja tidak akan pernah sampai ke *second-round*. Sebaliknya, mereka akan dihargai lebih untuk ekonomi yang baik di *first-round*, yang sebenarnya membantu mendorong mereka ke *second-round*.<sup>16</sup>

#### **2.1.4 Pendekatan Domain Kognitif (*Marketing*)**

Salah satu tokoh dalam pendekatan ini, Bruce I. Newman & Jagdish N. Sheth (1985) memandang perilaku memilih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan *marketing* dan bermuara pada pemahaman kognitif.<sup>17</sup> Oleh karena itu, terdapat tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah yang mendorong perilaku pemilih, yaitu isu

---

<sup>15</sup>Riski Dwi Jayani. (2017). Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya dalam Pilkada Tahun 2015. *Repository, Universitas Airlangga*, hlm. 10.

<sup>16</sup>Melody E. Valdini & Michael S. Lewis-Beck. (2018). Economic Voting in Latin America: Rules and Responsibility. *American Journal of Political Science*, 62(2), hlm. 421.

<sup>17</sup>Hermansyah Putra. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 37-38.

dan kebijakan politik (*issue and policies*), citra sosial (*social imagery*), perasaan emosional (*emotional feelings*), personalitas kandidat (*candidate image*), peristiwa mutakhir (*current events*), peristiwa personal (*personal events*), dan isu-isu epistemik (*epistemic issues*).<sup>18</sup> Pembahasan lebih lanjut ditampilkan pada Model Pemasaran Politik dalam kajian *split-ticket voting*.

Bobby J. Yuri & Adlin dalam kesimpulannya mengungkapkan bahwa hanya lima dari tujuh faktor Bruce I. Newman & Jagdish N. Sheth yang mempengaruhi secara signifikan perubahan perilaku memilih. Dalam hal ini, indikator isu dan kebijakan politik, citra sosial, perasaan emosional, citra kandidat, dan peristiwa mutakhir. Adapun indikator peristiwa mutakhir sebagai faktor yang sangat signifikan dalam mempengaruhi perubahan perilaku memilih masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Pintu Gobang Kari Tahun 2015.<sup>19</sup> Lain halnya riset yang dilakukan oleh Hermansyah Putra., *et al.* bahwa kualitas simbolik sebagai aspek citra sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku memilih, khususnya bagi kelompok pemilih religius pada Pilgub 2018 di Kota Sukabumi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Bruce I. Newman & Jagdish N. Sheth. (1985). A Model of Primary Voter Behavior. *Journal of Consumer Research*, Oxford University Press, 12(2), hlm. 178-179.

<sup>19</sup>Bobby J. Yuri & Adlin Adlin. (2018). Perubahan Perilaku Memilih Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Pintu Gobang Kari Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau*, 5(1), hlm. 12.

<sup>20</sup>Hermansyah Putra., *et al.* (2020). Social Image and Candidate's Image: A Case Study of Voting Behavior in the Gubernatorial Election in Indonesia's West Java in 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Universitas Medan Area*, 8(1), hlm. 55.

Pendekatan domain kognitif menjadi penting dalam kajian perilaku memilih sesuai hasil riset Wojciech Cwalina., *et al.* yang menguraikan bahwa dari sudut pandang marketing, konsultan politik menghadapi tantangan penting dalam memahami struktur dari faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan bagi kandidatnya. Oleh karena itu, konsultan politik dalam melakukan berbagai kampanye harus berusaha setiap saat untuk memahami kekhususan perilaku pemilih dan peran faktor situasional (media dan jajak pendapat, peristiwa terkini, dll) bagi kandidatnya.<sup>21</sup>

## 2.2 Konsep *Split-Ticket Voting*

Definisi yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan *split-ticket voting* adalah pandangan Barry C. Burden & Gretchen Helmke, yaitu fenomena dalam Pemilu di mana Pemilih memilih partai  $j$  pada kontes  $r$  dan memilih partai  $\sim j$  pada beberapa kontes lainnya.<sup>22</sup> Pada perkembangannya, beberapa tokoh melakukan penekanan pada titik tertentu dalam menggambarkan *split-ticket voting*. Hal ini dapat dilihat sesuai pandangan Patricio Navia & José Luis Saldaña bahwa *split-ticket voting* hanya dapat terjadi ketika ada Pemilu serentak di mana Pemilih memilih kandidat dari satu Parpol untuk satu jabatan dan kandidat dari Parpol berbeda untuk jabatan yang berbeda.<sup>23</sup> Hal ini berarti, fenomena

---

<sup>21</sup>Wojciech Cwalina., *et al.* (2004). Models of Voter Behavior in Traditional and Evolving Democracies: Comparative Analysis of Poland, Slovenia, and U.S. *Journal of Political Marketing*, 3(2), hlm. 28.

<sup>22</sup>Barry C. Burden & Gretchen Helmke. (2009). The Comparative Study of Split-Ticket Voting. *Electoral Studies, Elsevier*, 28(1), hlm. 2.

<sup>23</sup>Patricio Navia & José Luis Saldaña. (2015). Mis-Coordination and Political Misalignments in Ticket-Splitting: The Case of Chile, 2005–2009. *Contemporary Politics, Taylor & Francis*, 21(4), hlm. 486.

*split-ticket voting* lebih ditekankan pada konteks Pemilu di waktu yang sama.

Fenomena *split-ticket voting* hanya dapat dipahami jika dilakukan dalam Pemilu Serentak untuk lingkup kekuasaan yang sama maupun lingkup kekuasaan yang berbeda. Misalnya, lingkup kekuasaan yang sama, terdiri dari Pilkada serentak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan Pileg DPR serentak di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sementara lingkup kekuasaan yang berbeda, yaitu Pemilu Serentak antara Pileg DPR dan Pilpres.

Dimensi lainnya dari *split-ticket voting* adalah waktu, yaitu menggambarkan fenomena *split-ticket voting* pada saat Pemilu dilakukan secara bersamaan atau tidak bersamaan.<sup>24</sup> Contoh waktu yang bersamaan adalah Pemilu tahun 2019 antara Pilpres dan Pileg dilakukan secara bersamaan.

*Split-ticket voting* merupakan fenomena yang menjadi bagian dari perilaku memilih yang untuk mengungkapkan motifnya telah berkembang berbagai model yang merupakan turunan dari model perilaku memilih. Motif *split-ticket voting* hanya dapat diungkapkan melalui serangkaian gejala-gejala yang disebut faktor-faktor. Di sisi lain, model *split-ticket voting* yang berkembang dewasa ini juga mampu mengungkapkan lebih dari satu motif. Oleh karena itu, penentuan faktor-faktor dilakukan melalui dua cara, pertama direduksi melalui pengkajian motif dan model *split-ticket*

---

<sup>24</sup>Peter Bence Stumpf. (2020). Strategic Split-Ticket Voting in Mixed Electoral Systems: The Cases of Germany, Hungary, and Lithuania. *International Journal of Political Activism and Engagement, IGI Global*, 7(2), hlm. 3.

*voting* yang berkembang dewasa ini dan kedua, mereduksi berdasarkan konteks penelitian. Hal ini dikarenakan fenomena *split-ticket voting* antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang umumnya memiliki motif dan model yang berbeda.

### **2.2.1 Faktor-Faktor *Split-Ticket Voting***

Pemahaman terhadap fenomena *split-ticket voting* mengarah pada pertanyaan, mengapa fenomena *split-ticket voting* bisa terjadi? Mengapa Pemilih melakukan *ticket-splitting*? Apa motif yang mendasari Pemilih melakukan tindakan tersebut? Serangkaian pertanyaan ini dijawab dengan meninjau literatur tentang motif atau alasan mendasar dibalik *ticket-splitting* Pemilih.

Terdapat tiga teori utama yang umumnya digunakan dalam menjelaskan motif *split-ticket voting*. Pertama, motif tulus (*sincere motives*), yaitu *ticket-splitting* yang mencerminkan dukungan yang tulus, tetapi terbagi terhadap banyak partai atau kandidat. Kedua, motif strategis (*strategic motives*) yang mencerminkan pertimbangan taktis pemilih bahwa *ticket-splitting* dilakukan untuk memaksimalkan dampak politik seseorang. Ketiga, motif protes (*protest motives*), yaitu cara pemilih mengungkapkan ketidakpuasan terhadap partai atau kandidat di satu atau beberapa tingkat pemerintahan bahwa *ticket-splitting* dilakukan untuk menunjukkan ketidakpuasan.<sup>25</sup> Lebih lanjut, berbagai riset juga

---

<sup>25</sup>Sara Persson. (2020). Exploring Split Ticket Voting Motives. Dalam *Swedish National Election Studies Program Report Series 2020: 14*. Swedia: Department of Political Science, University of Gothenburg, hlm. 2.



menjelaskan motif-motif lainnya selain dari tiga motif *split-ticket voting* tersebut, antara lain yaitu motif koalisi (*coalition motives*) dan motif kebingungan (*confusion motives*).<sup>26</sup>

Secara kualitatif, pengungkapan motif *split-ticket voting* hendaknya didahului dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *split-ticket voting*. Berbagai faktor berdasarkan kajian literatur dilakukan seleksi yang betul-betul dipertimbangkan mampu menggambarkan fenomena *split-ticket voting* di Kota Makassar. Fakto-faktor *split-ticket voting* tidak hanya terkait erat dengan motif, tapi juga menjadi pijakan dasar untuk menilai model yang sesuai menggambarkan *split-ticket voting* di Kota Makassar.

*Split-ticket voting* sebenarnya bagian dari kajian perilaku memilih dalam ilmu politik. Tindakan Pemilih membagi suara untuk Parpol yang berbeda di lingkup kekuasaan yang berbeda adalah bentuk perilaku Pemilih yang membutuhkan alasan yang jelas mengapa hal itu bisa terjadi disaat yang sama Pemilih tersebut menyukai identitas Parpol tertentu. Pertanyaan lainnya, mengapa Pemilih tidak membuat pilihan politiknya menjadi searah berdasarkan identitas Parpol yang disukainya (*stright-ticket voting*). Perkembangan kajian faktor-faktor perilaku memilih, dewasa ini, tampaknya hanya terfokus pada sisi Pemilih saja sebagai individu yang punya hak sepenuhnya menentukan pilihan politiknya (logika demokrasi

---

<sup>26</sup>Thomas Gschwend & Henk van der Kolk. (2006). Split Ticket Voting in Mixed Member Proportional Systems: The Hypothetical Case of the Netherlands. *Acta Politica, Palgrave Macmillan*, 41, hlm. 165.

langsung). Dampaknya adalah sisi di luar Pemilih kurang menjadi fokus perbincangan.

Hal yang sama dapat diamati untuk teori *split-ticket voting*, yang menurut pengamatan Peneliti, umumnya di Indonesia hanya terfokus pada satu sisi saja, yaitu sisi Pemilih dalam mengungkapkan motif. Tentu adalah sebuah paradoks ketika di saat yang sama, telah menjadi hal yang umum dalam konteks demokrasi di Indonesia bahwa elit/aktor politik turut memberikan arah melalui koordinasi politik guna mempengaruhi sesuai hasil Pemilu yang diharapkan.

Pandangan de Tocqueville & Simmel searah dengan hal tersebut bahwa antara masyarakat dan elit terjadi hubungan yang timbal balik, yaitu elit yang secara tidak langsung melakukan pengawasan terhadap masyarakat, namun di sisi lain melalui aktivitas kelompok perantara, elit mampu menjaga kesatuan nilai-nilai idealism masyarakat. Hubungan yang sifatnya simbiosis mutualisme ini telah berdampak dimana masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat secara emosional menjadi terlibat ke dalam golongan elitnya.<sup>27</sup>

Elit/aktor sebagai sisi eksternal Pemilih tidak dapat dinafikan perannya di setiap momen Pemilu. Sesuai pandangan yang melihat stabilisasi sistem partai sebagai efek gabungan dari tindakan elit dan

---

<sup>27</sup>Suzanne Infeld Keller. (1998). *Penguasa dan Kelompok Elit: Peran Elit Penentu dalam Masyarakat Modern* (Terj. oleh Zahara D. Noer). Jakarta: Rajawali Pers. 232-235.

pemilih (Cox 1997; Kitschelt et al. 1999; Rose & Munro 2003).<sup>28</sup> Sementara itu, studi dari negara-negara demokrasi baru menemukan bahwa volatilitas<sup>29</sup> di negara-negara demokrasi baru sebagian besar didorong oleh elit (Gunther, 1989; Mair, 1997; Van Biezen, 2003).<sup>30</sup> Para Peneliti ini menegaskan bahwa strategi elit secara substantif bertanggung jawab atas hasil pemilu yang tidak menentu dari Pemilu ke Pemilu dan karena itu lebih baik menjelaskan volatilitas dalam sistem partai yang baru lahir (Gunther, 1989; Mair, 1997; Toole, 2000). Seperti rekan-rekan mereka yang karyanya difokuskan pada demokrasi maju, para peneliti ini juga berada di sisi ekstrem yang lain dengan menjelaskan volatilitas hanya dari perspektif elit dan mengabaikan peran pemilih. Meminjam istilah Roscoe (2003), pemilih seperti pengunjung di restoran yang pilihannya dibatasi oleh menu yang tersedia. Dengan demikian, para Peneliti yang telah mempelajari subjek ini di negara-negara demokrasi maju dan yang sedang berkembang memiliki kesamaan dalam cara yang berlawanan karena mereka melihat fenomena tersebut secara eksklusif dari perspektif pemilih dan elit.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Samuel Kofi Darkwa. (2019). "A Coordination-Based Approach to Subnational Variations in Split-Ticket Voting: The Case of Ghana 1996-2016". *Disertasi*. West Virginia University, hlm. 114.

<sup>29</sup>Volatilitas (*volatility*) sering didefinisikan sebagai gejala pergeseran kesetiaan Pemilih dari satu Parpol ke Parpol lain; dari Pemilu ke Pemilu lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Scott Mainwaring. (1997). *Multipartism, Robust Federalism, and Presidentialism in Brazil*. Dalam Scott Mainwaring & Matthew Soberg Shugart (Eds.), *Presidentialism and Democracy in Latin America* (hlm. 55-109). New York: Cambridge University Press, hlm. 61-62.

<sup>30</sup>Samuel Kofi Darkwa. (2019). *Loc. Cit.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

Peran pemilih sangat dipengaruhi oleh set pilihan yang tersedia terutama partai dan kandidat yang mencalonkan diri. Tindakan elit tersebut dimotivasi oleh insentif tertentu yang mendorong atau menghambat stabilitas sistem. Temuan ini didukung oleh penelitian di Afrika di mana penantang utama di negara demokrasi ini sering berganti-ganti antara pemilihan (Kuenzi dan Lambright, 2001; Lindberg, 2007; Wahman, 2014).<sup>32</sup>

Volatilitas telah menjadi sumber utama perubahan dan stabilitas sistem partai (sesuatu yang menyebabkan pembagian suara partai) di banyak yurisdiksi. Dalam demokrasi yang sudah mapan, para peneliti menemukan bahwa Pemilih bertanggung jawab untuk itu (Evans, 2002; Pedersen, 1979; Rose & Urwin, 1970; Taagepera & Grofman, 2003). Dalam demokrasi baru, bagaimanapun, para Peneliti telah menemukan elit untuk bertanggung jawab (Birch, 2003; Moser & Scheiner, 2009; Tavits, 2008). Sementara para Peneliti yang berfokus pada koordinasi strategis menemukan elit dan pemilih untuk bertanggung jawab (Cox, 1997; Kitschelt et al., 1999; Rose & Munro, 2003).<sup>33</sup>

Uraian yang telah dipaparkan tersebut, jelas bahwa secara umum perilaku Pemilih membagi suara di Parpol yang berbeda untuk lingkup kekuasaan yang berbeda dipengaruhi dua sisi utama, yaitu sisi Pemilih dan sisi eksternal Pemilih, yaitu elit/aktor Parpol. Dengan demikian, *split-ticket voting* baik melalui koordinasi secara tulus maupun secara strategis

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 115-116.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 140-141.

telah memperluas pengetahuan tentang bagaimana faktor-faktor tingkat elit dan pemilih berinteraksi untuk mempengaruhi fenomena tersebut.

Posisi ini juga sesuai terhadap beberapa hasil riset yang telah menemukan bahwa faktor-faktor tingkat individu tidak memadai dalam menjelaskan mengapa *split-ticket voting* terjadi (Burden dan Kimball, 1998, 2009; Bybee et al., 1981; Campbell dan Miller, 1957; Roscoe, 2003).

Thomas Gschwend & Henk van der Kolk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena *split-ticket voting*, yaitu sisi penawaran (*supply side*): Parpol dan kandidat, dan sisi permintaan (*demand side*): Pemilih.<sup>34</sup> Peneliti mereduksi dua set faktor tersebut menjadi faktor eksternal Pemilih: Parpol/elit dan faktor internal Pemilih.

## 1. Faktor Eksternal Pemilih

Faktor eksternal Pemilih dapat diamati dalam dua kategori, yaitu keputusan usungan Parpol dan gaya kampanye kandidat. Kategori pertama, Parpol harus memutuskan apakah akan mengusung kandidat di daerah pemilihan tertentu. Jika Parpol tidak mengusung kandidat di semua daerah pemilihan, maka Parpol tidak dapat mendorong *straight-ticket voting* kepada para pendukungnya.<sup>35</sup> Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan usungan Parpol,

---

<sup>34</sup>Thomas Gschwend & Henk van der Kolk. (2006). *Op. Cit.*, hlm. 164-170.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 164.

meliputi efek kontaminasi, biaya partisipasi, ketersediaan kandidat, dan ketersediaan koalisi pra-Pemilu.<sup>36</sup>

Penggambaran faktor di atas, mengarah pada pertanyaan mengapa begitu banyak Parpol yang mengusung kandidat dalam Pemilu, meskipun hanya sedikit dari kandidat yang akan menang? Para ahli berpendapat bahwa Parpol meningkatkan perolehan suara melalui daftar usungan kandidat dalam Pemilu. Kondisi inilah yang disebut efek kontaminasi dari keputusan usungan Parpol.<sup>37</sup> Jika efek kontaminasinya besar, Parpol akan memiliki insentif untuk mengusung kandidat di sebanyak mungkin Dapil untuk memanfaatkan efek ini. Jumlah Dapil yang diperebutkan hanya akan bergantung pada sumber daya Parpol, biaya partisipasi (misalnya, biaya sosialisasi, pendampingan hukum, dan operasional lainnya) dan ketersediaan kandidat. Parpol kecil juga memiliki insentif untuk mengoordinasikan masuknya ke dalam preferensi Pemilih melalui ketersediaan koalisi pra-Pemilu (dukungan kandidat koalisi, penarikan secara strategis).<sup>38</sup>

Efek kontaminasi adalah faktor yang perlu ditelaah lebih jauh lagi mengingat efek ini, dalam banyak kajian literatur, tidak nampak pada negara-negara yang menganut sistem proporsional murni, seperti di Indonesia.

Pemahaman terbaik mengenai efek kontaminasi ditemukan pada penjelasan Samuel Kofi Darkwa dalam disertasinya; “A

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

*Coordination-Based Approach to Subnational Variations in Split-Ticket Voting: The Case of Ghana 1996-2016*". Secara garis besar, terdapat tiga sistem pemilihan yang dominan dianut oleh berbagai negara di dunia ini, yaitu sistem *Proportional Representation* (PR), sistem *Single Member District* (SMD) dan sistem campuran (PR+SMD). Efek kontaminasi memiliki asumsi dasar bahwa insentif terjadi karena efek mekanis dari sistem pemilihan. Pemaparan Samuel Kofi Darkwa<sup>39</sup> bahwa dalam sistem campuran, karena sistem pemilihan yang tumpang tindih, elit berpotensi mendapatkan insentif dengan cara mengajukan kandidat di tingkat SMD untuk menciptakan bonus suara di tingkat PR sehingga menyebabkan pemilih memilih partai yang sama di kedua tingkat. Dalam hal ini, tindakan tersebut berarti mengurangi pemungutan suara yang bermotif strategis (*voting strategic*). Dampaknya adalah *split-ticket voting* akan berkurang karena Pemilih termotivasi melakukan *straight-ticket voting*. Inilah yang disebut sebagai efek kontaminasi oleh berbagai ahli politik.

Asumsi terjadinya tumpang tindih dalam sistem pemilihan campuran berasal dari pandangan Cox (1999)<sup>40</sup> yang memberikan model untuk memahami proses elit partai membuat 'keputusan masuk' (*entry decisions*) mereka. Model ini terkait dengan aturan M+1 (aturan *entry strategic* diperlukan elit partai), M mengacu pada besaran distrik (*District Magnitude*). Model ini menunjukkan bahwa ketika terdapat

---

<sup>39</sup>Samuel Kofi Darkwa. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 28-29.

<sup>40</sup>Gary W. Cox. (1999). Electoral Rules and Electoral Coordination. *Annual Review of Political Science*, 2, hlm 152.

Dapil yang menghendaki satu pemenang saja, maka jumlah calon yang layak di daerah pemilihan itu adalah dua (yaitu besaran Dapil ditambah satu). Jika elit politik mengajukan lebih dari dua kandidat di Dapil tersebut, maka para pemilih yang hanya peduli dengan pemilu saat itu dan ingin suara mereka dihitung, akan menarik dukungan dari kandidat-kandidat yang kurang layak. Misalnya, seorang Pemilih yang kandidat pilihannya adalah kandidat peringkat ketiga akan lebih memilih untuk memilih salah satu dari dua kandidat teratas daripada kandidat peringkat ketiga.

Akibatnya, Sistem SMD dengan konteks aturan pluralitas sering direduksi menjadi kompetisi antara kandidat yang paling layak. Dengan cara ini, Sistem SMD dengan aturan pluralitas mendukung sistem dua partai. Di sisi lain, Sistem PR kurang menghukum partai-partai kecil karena besaran distrik lebih besar dari "1" dan cenderung menghasilkan pembelotan yang kurang strategis (Duverger, 1954). Dengan demikian, seorang pemilih yang pilihan utamanya adalah kandidat (atau partai) peringkat ketiga akan tetap memilih kandidat tersebut dan masih dapat mempengaruhi sistem. Dampaknya, Sistem PR cenderung menghasilkan kompetisi multipartai.<sup>41</sup>

Jika diurai lebih jauh, Sistem SMD di bawah aturan pluritas cenderung menghasilkan *ID party* yang kuat, sedangkan Sistem PR cenderung menghasilkan *ID party* yang rendah. Ketika sistem

---

<sup>41</sup>Samuel Kofi Darkwa. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 107.



pemilihan campuran menggabungkan Sistem SMD dengan Sistem PR, maka akan menghasilkan campuran dari kedua sistem tersebut. Hal ini terjadi karena persaingan di tingkat SMD akan berkurang menjadi urusan dua pihak sedangkan tingkat PR akan menghasilkan persaingan multipartai (Milazzo, Moser, dan Scheiner 2018; Moser dan Scheiner 2005, 2012; Rich 2014).<sup>42</sup>

Pada titik campuran kedua sistem tersebutlah, para pendukung efek kontaminasi berpendapat bahwa penggunaan aturan pemilu yang berbeda di daerah pemilihan yang sama akan menghasilkan bonus suara di tingkat PR bagi partai-partai yang mengikuti pemilu di tingkat SMD (Ferrara, Herron, dan Nishikawa 2005; Guinjoan 2016; Herron dan Nishikawa 2001).<sup>43</sup>

Sementara, untuk Sistem PR murni, seperti yang dianut Indonesia dewasa ini, persaingan kompetisi yang semakin ketat membuat insentif semakin kabur. Sebagai pengganti dari efek kontaminasi, umumnya politisi Indonesia menggunakan istilah Efek Ekor Jas (*Coattail Effect*).<sup>44</sup>

Secara teoretik sistem presidensial dipersepsikan memiliki tiga kelemahan utama. Pertama, sistem presidensial yang berbasis multipartai tidak sederhana cenderung akan menghasilkan debat

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Jika efek kontaminasi titik tekannya adalah insentif, maka efek ini juga mirip pada efek ekor jas. Untuk lebih jelasnya, Ignacio Lago. (2012). Strategic Voting in Proportional Representation System: Evidence from a Natural Experiment. *Party Politics*, SAGE Publications, 18(5), hlm. 656.

parlemen yang terlalu terpecah-pecah dan menajam sehingga suatu saat terjadi kelumpuhan kelembagaan (*imobilitas*) dan akibatnya kebuntuan (*deadlock*) hubungan eksekutif-legislatif. Kebuntuan itu akan berujung pada instabilitas demokrasi. Kedua, sistem multipartai menghasilkan polarisasi ideologis ketimbang sistem dwipartai sehingga seringkali menimbulkan problem komplikasi ketika dipadukan dengan sistem presidensial. Ketiga, kombinasi sistem presidensial dengan sistem multipartai berkomplikasi pada kesulitan membangun koalisi antarpantai dalam demokrasi presidensial sehingga berimplikasi pada rusaknya stabilitas demokrasi.<sup>45</sup>

Lili Romli<sup>46</sup> memaparkan bahwa parlemen sangat fragmentatif serta tanpa partai atau kekuatan politik mayoritas. Potensi konflik akibat *dual democratic legitimacy*, begitu pula perbedaan basis politik antara Presiden dan Parlemen memicu munculnya konflik. Konflik antara Presiden-Parlemen bisa mengarah pada “pemerintahan terbelah” (*the divided government*) dan jalan buntu politik (*deadlock*), sehingga berujung pada instabilitas demokrasi presidensial dan pemerintahan tidak efektif. Pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014 menghasilkan “Presiden minoritas”, presiden dengan basis politik relatif kecil di parlemen serta DPR tanpa kekuatan mayoritas. Meskipun pada periode 2004-2014 dibentuk “pemerintah mayoritas”

---

<sup>45</sup>Scott Scott Mainwaring. (1993). Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination. *Comparative Political Studies*, 26(2), hlm. 221-222.

<sup>46</sup>Lili Romli. (2018). Problematik dan Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal Communitarian, Universitas Bung Karno*, 1(1), hlm. 21.

(KIB), tetapi tidak efektif karena koalisi yang semu; Terjadi persaingan legitimasi Presiden-DPR yang memicu munculnya konflik (14 usulan interpelasi dan 9 usulan angket yang didukung parpol pendukung pemerintah; SBY tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPR).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka menurut Lili Romli<sup>47</sup>, negara penganut sistem presidensial berbasis multipartai, berbagai komplikasi politik tersebut bisa dikurangi melalui skema pemilu serentak, yaitu pertama, peningkatan efektifitas pemerintahan karena pemerintahan hasil pemilu lebih stabil sebagai akibat *coattail effect*, yakni keterpilihan calon presiden dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol yang sama. Artinya pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap Presiden terpilih. Kedua, pembentukan koalisi politik yang dilakukan sebelum pemilu legislatif diharapkan dapat “memaksa” parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunis menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Ketiga, diharapkan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian menuju sistem multipartai sederhana (moderat). Sebagai akibat terpilihnya parpol atau gabungan parpol yang sama dalam pemilu presiden dan pemilu DPR, fragmentasi parpol di parlemen berkurang dan pada

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

akhirnya diharapkan berujung pada terbentuknya sistem multipartai moderat.

Pendapat Usep Hasan Sadikin<sup>48</sup> bahwa open-list proportional representation tidak efektif dalam mengoptimalkan *efek coattail*. Jika Pemilih ditawarkan pilihan pilihan, ada kecenderungan bahwa pilihan presiden tidak sesuai dengan pilihan Parpol yang mencalonkan Presiden karena para Pemilih memilih calon legislatif berdasarkan kualitas calon legislatif, bukan kualitas partai/presiden. Kecenderungan ini tetap ada meskipun Pemilu dilakukan secara serentak.

Kategori kedua, kandidat Parpol dapat memilih gaya kampanye yang berpusat pada kepribadiannya atau berpusat pada *platform* Parpol guna meraih suara Pemilih sebanyak-banyaknya. Jika kandidat melakukan kampanye secara pribadi, itu akan mendorong *split-ticket voting* dan Pemilih dapat melakukannya berdasarkan motif tulus (*sincere motives*). Sebaliknya, jika kandidat melakukan kampanye dengan berpusat pada Parpol, itu akan mendorong *straight-ticket voting*.<sup>49</sup> Keberhasilan seorang kandidat dalam meraih suara Pemilih sangat bergantung pada popularitas Parpol. Alih-alih kandidat yang hanya melakukan kampanye yang berpusat pada partai, akan tetapi

---

<sup>48</sup>Rizki Bagus Prasetio & Febri Sianipar. (2021). The Relevance of the Application of the Presidential Threshold and the Implementation of Simultaneous Elections in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, 21(2), hlm. 279.

<sup>49</sup>Thomas Gschwend & Henk van der Kolk. (2006). *Loc. Cit.*

kandidat lebih cenderung memutuskan untuk melakukan kampanye secara pribadi.<sup>50</sup>

## 2. Faktor Internal Pemilih

Faktor-faktor *split-ticket voting* pada internal Pemilih ditinjau berdasarkan aspek individu. Pengelompokan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilih melakukan *ticket-splitting*, antara lain:<sup>51</sup>

- a. Kekuatan keberpihakan (*Strength of partisanship*);
- b. Pengetahuan politik dan kecanggihan politik (*Political knowledge and political sophistication*);
- c. Jumlah informasi yang tersedia (*Amount of information available*):
  - 1) Jabatan (*Incumbency*),
  - 2) Informasi kampanye yang dapat diandalkan untuk membentuk harapan/pengeluaran kampanye (*Reliable campaign information to form expectations/campaign expenditures*), dan
  - 3) Identifikasi pola koalisi yang stabil pada pra-Pemilu (*pre-electoral Identifiability of stable coalition patterns*);
- d. Standar “daftar kandidat” (*size of the ‘menu’*).

Penggambaran faktor di atas juga bersesuaian dengan penelitian Sara Persson terkait pengelompokan faktor-faktor yang memotivasi pemilih melakukan *ticket-splitting*.<sup>52</sup> Adapun faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, faktor kekuatan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>52</sup> Sara Persson. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 8-11.

keberpihakan mengacu pada salah satu hasil penelitian yang paling kuat bahwa semakin besar motivasi Pemilih melakukan *ticket-splitting* maka keberpihakan Pemilih secara politik sangat lemah.<sup>53</sup> Pemilih yang tidak terkait erat dengan Parpol dan/atau kandidat tertentu lebih cenderung untuk melakukan *ticket-splitting*.<sup>54</sup>

*Kedua*, faktor pengetahuan dan kecanggihan politik mengacu pada kemampuan kognitif Pemilih untuk mengakses informasi terkait Parpol dan kandidat. Dalam hal ini, Pemilih dapat menahan diri untuk menggunakan jalan pintas yang lebih mudah diproses (memperceyahi isu Parpol dan kandidat yang belum jelas kepastiannya).<sup>55</sup>

Faktor pengetahuan dan kecanggihan politik lebih jauh terkait dengan pada model demografi & sosial-ekonomi, fenomena *split-ticket voting* terjadi karena alasan sosiologis atau demografis. *Split-ticket voting* lebih mungkin terjadi pada Pemilih dengan latar belakang tertentu daripada berdasarkan faktor perilaku pemilih, misalnya gender perempuan, pendidikan tinggi, status sosial ekonomi tinggi, etnis, dan sebagainya.<sup>56</sup>

Terdapat banyak indikator yang dapat dianalisis dari model demografi & sosial-ekonomi. Namun, dominan dari indikator model ini tidak dapat dijadikan patokan dalam menjelaskan fenomena *split-ticket*

---

<sup>53</sup>Thomas Gschwend & Henk van der Kolk. (2006). *Op. Cit.*, hlm. 169.

<sup>54</sup>Sara Persson. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>55</sup>Thomas Gschwend & Henk van der Kolk. (2006). *Loc. Cit.*

<sup>56</sup>Muhammad Qodari. (2016). "Split-Ticket Voting dan Faktor-Faktor yang Menjelaskannya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2014". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada, hlm. 192.

*voting*. Misalnya, penelitian yang lebih awal dilakukan oleh Angus Campbell & Warren E. Miller, di mana tidak menemukan keterkaitan antara *split-ticket voting* dengan karakteristik sosial-ekonomi Pemilih.<sup>57</sup> Selanjutnya Carl R. Bybee., *et al.*, dan Douglas D. Roscoe juga tidak menemukan hubungan yang signifikan antara *split-ticket voting* dengan usia dan tingkat pendidikan Pemilih.<sup>58</sup> Demikian pula dengan penelitian Janelle Middents yang tidak menemukan perbedaan yang signifikan dari faktor generasi (usia), gender, dan tingkat pendidikan dalam menjelaskan *ticket-splitting*.<sup>59</sup> Sara Persson mengelompokkan kecanggihan politik berdasarkan beberapa faktor, antara lain:<sup>60</sup>

- 1) Tingkat Pendidikan, dimana Pemilih dengan kategori pendidikan tinggi lebih cenderung pada motif strategis ketimbang motif tulus. Sebaliknya, Pemilih dengan pendidikan rendah lebih cenderung merujuk pada motif tulus maupun motif lainnya;
- 2) Kepentingan politik, dimana Pemilih yang tertarik secara politik (memiliki kepentingan politik) lebih cenderung pada motif tulus dan motif strategis dalam melakukan *ticket-splitting*. Sebaliknya, Pemilih yang tidak tertarik secara politik (tidak memiliki kepentingan politik) lebih cenderung tidak mengungkapkan motif

---

<sup>57</sup> Angus Campbell & Warren E. Miller. (1957). The Motivational Basis of Straight and Split Ticket Voting. *American Political Science Review*, 51(2), hlm. 296-299.

<sup>58</sup> Carl R. Bybee., *et al.* (1981). Mass Communication and Voter Volatility. *Public Opinion Quarterly, Oxford University*, 45(1), hlm. 87-88; Douglas D. Roscoe. (2003). The Choosers or the Choices? Voter Characteristics and the Structure of Electoral Competition as Explanations for Ticket Splitting. *The Journal of Politics, The University of Chicago*, 65(4), hlm. 1156-1161.

<sup>59</sup> Janelle Middents. (2010). "Understanding the Split-Ticket Voter". *Tesis*. University of Central Florida. 34-41.

<sup>60</sup> Sara Persson. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 10.

tulus, namun lebih cenderung pada motif tambahan/lainnya, dan sedikit lebih cenderung pada motif strategis; dan

- 3) Pengetahuan politik, dimana Pemilih dengan pengetahuan politik yang rendah cenderung kurang mengacu pada motif strategis dibandingkan Pemilih dengan pengetahuan politik sedang atau tinggi.

*Ketiga*, faktor jumlah informasi yang tersedia dan diterima oleh Pemilih selama masa kampanye terdiri dari beberapa faktor turunan, antara lain:<sup>61</sup>

- 1) Jabatan, dimana sangat jelas berkaitan dengan keseluruhan *branding* kandidat, mengingat serangkaian program yang dijalankan selama masa jabatannya menjadi catatan layanan publik. Oleh karena itu, kandidat menjadi familiar bagi Pemilih;
- 2) Informasi kampanye yang membentuk harapan, dimana Pemilih hanya akan melakukan *ticket-splitting* secara strategis apabila Parpol dan kandidat berhasil membangun isu bahwa Partainya bisa mendapatkan alokasi kursi dalam Pemilu. Di sisi lain, Pemilih dapat menyimpulkan dari lanskap elektoral dari Pemilu sebelumnya sehingga membentuk preferensi bahwa Parpol mana yang dapat diunggulkan dan Parpol mana yang peluang lolosnya sangat kecil dalam Pemilu. Dalam hal ini, pembentukan harapan tersebut lebih mendekati kondisi Parpol kecil. Oleh karena itu,

---

<sup>61</sup>Thomas Gschwend & Henk van der Kolk. (2006). *Op. Cit.*, hlm. 169-170.



Parpol akan menggunakan lebih banyak dana sebagai proksi untuk intensitas kampanye; dan

- 3) Identifikasi pola koalisi yang stabil pada pra-Pemilu, dimana Pemilih hanya akan melakukan *ticket-splitting* apabila Parpol dan kandidat berhasil membentuk preferensi multi-partai atau koalisi. Dalam hal ini, Pemilih lebih cenderung pada motif koalisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada sub pembahasan motif *split-ticket voting*.

*Keempat*, faktor '*size of the 'menu*'" mengacu pada asumsi dasar bahwa adanya jarak ideologis antara Parpol dengan kandidat. Oleh karena itu, tindakan kandidat cenderung tidak memperlihatkan kekhasan Parpol. Di sisi lain, massifnya fenomena *split-ticket voting* karena Pemilih melihat bahwa Parpol cenderung serupa. Hal ini mencakup beberapa faktor pelengkap yang diambil dari model *strategic voting*.

Pemahaman terhadap model *strategic voting* mengacu pada motif strategis dalam menjelaskan fenomena *split-ticket voting*. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan dalam konteks *split-ticket voting*, maka *strategic voting* harus dijelaskan terlebih dahulu secara konseptual.

Titik berangkat model *strategic voting* adalah pendekatan pilihan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih.<sup>62</sup> Model pilihan

---

<sup>62</sup>Janelle Middents (2010). *Op. Cit.*, hlm. 7.

rasional yang diturunkan dari model ekonomi Adam Smith dapat diartikulasikan bahwa kita melihat diri kita sendiri sebagai aktor lainnya dan menggambarkan hubungan berdasarkan berbagai pilihan yang tersedia.<sup>63</sup> Dalam hal ini tidak terkait dengan hubungan secara moralitas melainkan hubungan yang dapat diukur secara material. Selanjutnya, individu tidak dapat mencapai semua hal yang mereka inginkan. Mereka juga harus membuat pilihan dalam kaitannya dengan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu harus mengantisipasi hasil dari tindakan alternatif dan menghitung apa yang terbaik untuk mereka. Dalam hal ini, individu yang rasional memilih alternatif yang mungkin memberikan kepuasan terbesar bagi mereka.<sup>64</sup> Apabila dihubungkan dengan teori politik, model pilihan rasional mengasumsikan bahwa aktor memiliki beberapa tujuan yang dapat dicapai dalam pikirannya. Oleh karena itu, aktor menempatkan keinginan mereka dalam urutan preferensial. Dalam hal ini, jika aktor tidak mencapai tujuan utamanya, maka masih ada urutan terbaik kedua, terbaik ketiga, dan urutan terbaik berikutnya.<sup>65</sup>

Istilah *strategic voting* (pemungutan suara strategis) disebut juga sebagai “pemungutan suara taktis”, yang mengacu pada situasi

---

<sup>63</sup>*Ibid.*; Lihat juga Kristen Renwick Monroe. (2001). Paradigm Shift: From Rational Choice to Perspective. *International Political Science Review, SAGE Journals*, 22(2), hlm. 151.

<sup>64</sup>John Scott. (2000). Rational Choice Theory. Dalam Gary Browning., Abigail Halcli., & Frank Webster (Eds.), *Understanding Contemporary Society: Theories of the Present* (hlm. 126-138). London: SAGE Publications. 127.

<sup>65</sup>Janelle Middents (2010). *Op. Cit.*, hlm. 8.

di mana Pemilih mendukung dan memilih Parpol atau kandidat pilihan keduanya karena persepsi bahwa pilihan kedua mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan Pemilu daripada pilihan pertamanya.<sup>66</sup> Selanjutnya, Definisi ini dapat diperluas dengan mengganti pilihan kedua dengan pilihan yang lain karena Pemilih menilai bahwa pilihan ke-n memiliki peluang menang yang lebih besar lagi. Para peneliti sering mencatat bahwa situasi seperti itu khusus untuk sistem multipartai, di mana Pemilih memilih antara alternatif pilihan kedua dan ketiga karena pilihan tersebut dinilai paling rasional untuk menang.<sup>67</sup>

Anthony Downs (1957) lebih lanjut menjelaskan bahwa perilaku pemilih rasional melakukan tindakan *strategic voting* karena mereka menganggap suaranya sebagai alat dalam proses seleksi, bukan hanya ekspresi preferensi.<sup>68</sup> Akibatnya, para Pemilih strategis berusaha membuat keputusan yang optimal di tempat pemungutan suara. Pemilih akan memilih Parpol atau kandidat yang menjanjikan hasil politik yang sukses. Dalam hal ini, memilih berdasarkan preferensi politik mereka untuk mendapatkan perwakilan atau setidaknya Pemilih meminimalisir perolehan suara untuk Parpol atau kandidat yang paling tidak mereka harapkan untuk menang.<sup>69</sup> Seperti

---

<sup>66</sup>Peter Bence Stumpf. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 2; Lihat juga André Blais & Richard Nadeau. (1996). Measuring Strategic Voting: A Two-Step Procedure. *Electoral Studies, Elsevier*, 15(1), hlm. 40.

<sup>67</sup>Peter Bence Stumpf. (2020). *Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*

yang diuraikan oleh Anthony Downs, tindakan Pemilih ini didasarkan pada teori pilihan rasional dan strategis sebagai lawan dari pemilih yang ekspresif.<sup>70</sup>

Adapun dalam sistem pemilihan PR (sesuai dengan konteks Indonesia), aspek strategis dari perolehan suara dominan dapat dijelaskan oleh ambang batas.<sup>71</sup> Ambang batas dapat menjadi motivasi penting bagi Parpol, sedangkan Pemilih dapat meninggalkan Parpol dengan peluang yang rendah untuk melewati ambang batas tersebut.

Perkembangan berbagai riset telah menunjukkan model *strategic voting* dalam menjelaskan fenomena *split-ticket voting* dan lebih jauh sampai pada aspek pentingnya pendekatan koordinasi dalam menjelaskan motif strategis sebagai motivasi perilaku pemilih. Literatur tentang pendekatan koordinasi sudah mulai banyak dan beragam. Walau demikian, penggunaannya masih minim dalam keterkaitannya dengan fenomena *split-ticket voting* di Indonesia.

Koordinasi menurut pandangan Thomas W. Malone, adalah tindakan memproses informasi tambahan ketika terhubung oleh banyak aktor untuk mewujudkan tujuan yang tidak dapat dicapai jika tujuan yang sama tersebut dilakukan oleh satu aktor.<sup>72</sup> Samuel Kofi

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>72</sup> Thomas W. Malone. (1988, 19 Februari). What is Coordination Theory? Makalah dipresentasikan pada *National Science Foundation Coordination Theory Workshop*, diselenggarakan oleh Massachusetts Institute of Technology Cambridge, di Massachusetts, hlm. 5.

Darkwa menjelaskan koordinasi adalah mekanisme atau serangkaian tindakan strategis yang digunakan oleh aktor/elit politik untuk mengomunikasikan niatnya tentang arah yang mereka harapkan dari hasil Pemilu nantinya.<sup>73</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa setiap tindakan membutuhkan koordinasi sehingga dapat bekerja sama sebagai satu tim guna mewujudkan tujuan bersama. Tindakan hanya dapat diwujudkan dengan menghubungkan atau melibatkan banyak aktor, artinya tujuan bersama ini tidak dapat dicapai jika hanya satu aktor yang melaksanakannya.

Pada dasarnya, teori koordinasi Gary W. Cox didasarkan pada pengamatan Maurice Duverger tentang bagaimana sistem Pemilu mempengaruhi struktur aturan Pemilu.<sup>74</sup> Dari hubungan tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana faktor tingkat Pemilih dan kandidat dari Parpol saling terkait, membentuk tindakan strategis, dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya fenomena *split-ticket voting*.<sup>75</sup>

Maurice Duverger (1967) mengamati bahwa sistem Pemilu memiliki efek logis tertentu pada aturan Pemilu pada Pemilih dan kandidat dari Parpol. Sistem Pemilu yang mengadopsi aliran pluralitas cenderung mengarah pada sistem dua partai sedangkan sistem Pemilu yang mengadopsi aliran proporsional cenderung mengarah

---

<sup>73</sup>Samuel Kofi Darkwa. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 156.

<sup>74</sup>Gary W. Cox. (1999). *Op. Cit.*, hlm. 155.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 153.

pada sistem multipartai.<sup>76</sup> Selanjutnya, efek logis pada struktur kompetisi berdasarkan sistem Pemilu terdiri dari efek mekanis dan psikologis. Efek mekanis berkaitan dengan proses di mana distribusi suara diubah menjadi alokasi kursi.<sup>77</sup> Efek mekanis muncul dari bagaimana penerapan ketat Undang-Undang Pemilu memengaruhi pengalokasian kursi.<sup>78</sup> Efek psikologis berkaitan dengan bagaimana Pemilih dan kandidat dari Parpol mengondisikan perilaku mereka dalam mengantisipasi efek mekanis.<sup>79</sup> Dengan demikian, efek psikologis muncul dari efek mekanis terhadap Pemilih dan kandidat dari Parpol.<sup>80</sup>

Lebih lanjut, Gary W. Cox (1997) memberikan formula (ekspresi logis) untuk memahami bagaimana efek mekanis dan psikologis menyusun aturan Pemilu secara berbeda dalam sistem Pemilu yang berbeda.<sup>81</sup> Dalam pandangannya, karena efek mekanis berkaitan dengan proses di mana distribusi suara diubah menjadi alokasi kursi di suatu Dapil, maka jumlah kursi di Dapil (berdasarkan jumlah pemilih) menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam mencapai

---

<sup>76</sup>Lihat Robert G. Moser. (1999). Electoral Systems and the Number of Parties in Postcommunist States. *World Politics, Cambridge University Press*, 51(3), hlm. 137.

<sup>77</sup>Jon H. Fiva & Olle Folke. (2014). Mechanical and Psychological Effects of Electoral Reform. *British Journal of Political Science, Cambridge University Press*, 46(2), hlm. 268-269.

<sup>78</sup>Netina Tan. (2013). Manipulating Electoral Laws in Singapore. *Electoral Studies, Elsevier*, 32(4), hlm. 637.

<sup>79</sup>André Blais & R. K. Carty. (1991). The Psychological Impact of Electoral Laws: Measuring Duverger's Elusive Factor. *British Journal of Political Science, Cambridge University Press*, 21(1), hlm. 82.

<sup>80</sup>Min Reuchamps., et al. (2014). Raising the Threshold, Fighting Fragmentation? Mechanical and Psychological Effects of the Legal Electoral Threshold in Belgium. *West European Politics, Routledge*, 37(5), hlm. 1104-1105.

<sup>81</sup>Lihat Samuel Kofi Darkwa. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 29.

formula (ekspresi logis) tersebut.<sup>82</sup> Formula (ekspresi logis) tersebut juga harus berlaku bagi Pemilih dan kandidat dari Parpol yang dipengaruhi oleh efek mekanis dari sistem Pemilu untuk menyesuaikan perilaku mereka dalam memperhitungkan perolehan suara.

Dari uraian di atas, Samuel Kofi Darkwa menilai bahwa jika kandidat dan Parpol ingin membuat penghitungan suara (mendapatkan manfaat elektoral), mereka harus mengadopsi perhitungan strategis, sementara Pemilih harus mengadopsi perilaku pemilihan strategis.<sup>83</sup> Dengan demikian, kandidat dari Parpol harus melakukan koordinasi, baik kepada Tim Pemenang, kandidat dari Parpol yang sama, maupun kandidat dari Parpol yang berbeda. Namun, misalkan kandidat dari Parpol gagal dalam melakukan koordinasi, Pemilih akan memusatkan suara mereka pada kandidat dari Parpol lainnya agar suara mereka tetap masuk dalam hitungan, sebagaimana selaras dengan aturan Pasal 415 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.

Pendekatan *Koordinasi* berdasarkan kajian literatur tersebut telah berkontribusi menganalisis fenomena *split-ticket voting* di level individu. Pada level individu, teori koordinasi beroperasi dengan asumsi bahwa Pemilih akan senang jika setelah memilih kandidat atau Parpol yang paling mereka sukai, suaranya dimasukkan dalam

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

perhitungan dan mempengaruhi hasil Pemilu.<sup>84</sup> Pemilih juga dibatasi oleh pilihan yang tersedia dan juga dibatasi oleh Undang-Undang Pemilu yang mengatur proses pendistribusian suara diubah menjadi alokasi kursi.<sup>85</sup> Dalam hal ini, Samuel Kofi Darkwa menekankan bahwa Pemilih pada akhirnya akan memilih kandidat atau Parpol pilihan mereka atau memilih sedemikian rupa untuk membantu mengalahkan pilihan yang paling tidak mereka sukai.<sup>86</sup> Dengan cara ini, Pemilih yang rasional akan mengoordinasikan suaranya pada kandidat yang paling kompetitif meskipun kandidat tersebut tidak berasal dari usungan Parpol dukungannya. Pada posisi ini, Pemilih menemukan alasan rasional untuk melakukan *ticket-splitting*.

Dengan model analisis level individu dalam penelitiannya, Samuel Kofi Darkwa (2019) telah membuktikan hipotesisnya. Analisis di level individu pada model ini tidak hanya menghubungkan perilaku Pemilih dengan fenomena *split-ticket voting*, namun juga menghubungkannya berdasarkan teori koordinasi. Asumsi dasarnya bahwa dalam Pemilu, Pemilih memberikan suaranya secara strategis untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu memilih siapapun untuk mengalahkan kandidat yang paling tidak mereka sukai. Pada titik inilah Pemilih melakukan *ticket-splitting*. Adapun ringkasan hasil

---

<sup>84</sup>Gary W. Cox. (1999). *Op. Cit.*, hlm. 154; Jeffrey A. Karp. (2009). Candidate Effects and Spill-Over in Mixed Systems: Evidence from New Zealand. *Electoral Studies, Elsevier*, 28(1), hlm. 49.

<sup>85</sup>Gary W. Cox. (1999). *Ibid.*, hlm. 146; Douglas D. Roscoe. (2003). *Op. Cit.*, hlm. 1159-1160

<sup>86</sup>Samuel Kofi Darkwa. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 69.



penelitian Samuel Kofi Darkwa (2019) terkait fenomena *split-ticket voting* dalam Pendekatan Koordinasi level individu, dapat diamati pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Fenomena *Split-Ticket Voting* dalam Pendekatan Koordinasi Strategis Level Individu**

Kode	Bagian	Keterangan
H1	Hipotesis	Semakin mirip Partai-Partai dalam persepsi Pemilih, semakin besar kemungkinan Pemilih untuk melakukan <i>ticket-splitting</i> , sehingga fenomena <i>split-ticket voting</i> terjadi di distrik tersebut.
	Indikator	<i>Strategic/Policy Balancing</i> (Perimbangan Kebijakan/Strategis)
	Hasil	Signifikan
	Penjelasan	Ketika kandidat atau Parpol menjadi lebih mirip, Pemilih akan meningkatkan <i>split-ticket voting</i> , dan sebaliknya Pemilih akan meminimalisir <i>split-ticket voting</i> ketika mereka menekankan inti dari kekhasan Parpol.
H2	Hipotesis	Semakin besar miskordinasi di tingkat Dapil, semakin tinggi kemungkinan terjadinya <i>split-ticket voting</i> antar Calon Anggota Parlemen.
	Indikator	<i>(Mis)Coordination Ticket-Splitting</i>
	Hasil	Signifikan
	Penjelasan	Elit Parpol dan pendukung Parpol lebih mementingkan Pilpres karena lingkup kekuasaan Eksekutif dianggap lebih tinggi daripada Legislatif.
H3	Hipotesis	Pemilih yang menilai pencapaian kinerja atau kebijakan ekonomi Presiden di masa lalu rendah, dan menilai pencapaian kinerja atau pembuatan peraturan Legislator dari Parpol Presiden tersebut tinggi, maka mungkin Pemilih akan melakukan <i>ticket-splitting</i> .
	Indikator	<i>Economic Voting</i>
	Hasil	Kurang Signifikan
	Penjelasan	Melalui <i>economic voting</i> , koordinasi Pemilih dapat menyebabkan terjadinya fenomena <i>split-ticket voting</i> ketika kinerja atau kebijakan ekonomi Calon Presiden Petahana dipertaruhkan
H4	Hipotesis	Pemilih yang memiliki kesamaan etnis dengan Calon Presiden dan Calon Anggota Parlemen dari Parpol lain, Pemilih lebih cenderung melakukan <i>ticket-splitting</i> jika kandidat dari etnis mereka adalah alternatif yang layak dan mereka khawatir tentang pilihan yang paling layak.
	Indikator	Etnisitas
	Hasil	Signifikan
	Penjelasan	Etnisitas merupakan alat koordinasi Pemilih yang menyebabkan terjadinya fenomena <i>split-ticket voting</i> atau sebaliknya tergantung dari arah koordinasinya, terutama di antara etnis minoritas.
H5A	Hipotesis	Pemilih yang menghadiri pertemuan dengan kandidat atau tim pemenangnya cenderung tidak melakukan <i>ticket-splitting</i> .

Kode	Bagian	Keterangan
	Indikator	Demografi & Sosial-Ekonomi
	Hasil	Kurang Signifikan
	Penjelasan	Minat Pemilih untuk berpartisipasi dalam kampanye atau menghadiri pertemuan menjadi signifikan ketika Pemilih tertarik untuk mengharapkan hasil Pemilu tertentu.
H5B	Hipotesis	Pemilih yang bekerja untuk kandidat atau Parpol cenderung tidak melakukan <i>ticket-splitting</i> .
	Indikator	Demografi & Sosial-Ekonomi
	Hasil	Signifikan
	Penjelasan	Pemilih yang bekerja untuk kandidat kurang terlibat dalam melakukan <i>ticket-splitting</i> .

Sumber: Data Diolah dari Hasil Penelitian Samuel Kofi Darkwa (2019).

Hipotesis pertama terbukti positif karena Pemilih menganggap bahwa semakin banyak kesamaan yang dimiliki oleh Parpol yang bersaing, semakin besar kemungkinan terjadinya fenomena *split-ticket voting*. Samuel Kofi Darkwa menganalisis dengan melihat fakta bahwa:<sup>87</sup>

- 1) Kandidat yang dapat meningkatkan persepsi Pemilih tentang kesamaan di mana kandidat atau Parpol bergerak lebih dekat ke platform Parpol lainnya; atau
- 2) Kandidat berjarak dari platform Partainya, sedangkan rekan kandidat sesama Partainya sementara menekankan inti dari kekhasan Partainya.

Dari kondisi di atas, maka tindakan Kandidat tersebut lebih mendorong terjadinya fenomena *split-ticket voting*. Jadi, ketika kandidat atau Parpol menjadi lebih mirip, maka akan meningkatkan terjadinya fenomena *split-ticket voting*. Sebaliknya, ketika sesama

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

kandidat sesama Parpol menekankan inti dari kekhasan Partainya, mereka meminimalisir terjadinya fenomena *split-ticket voting*. Dengan kata lain, tindakan koordinasi yang disengaja untuk menjauh dari platform Parpol mereka atau lebih dekat ke platform Parpol lainnya dalam bentuk isu *positioning* dapat mempengaruhi terjadinya fenomena *split-ticket voting*.

Contoh yang paling sederhana untuk memahami H1, misalnya terdapat wilayah kecil yang sebagian besar Pemilihnya adalah simpatisan militan Parpol A karena kesamaan aliran-aliran tertentu dalam agama (khas). Saat Pileg digelar, sebagian besar Pemilih tersebut tetap memilih Caleg DPR RI Parpol A, namun hanya sebagian Pemilih yang memilih Caleg DPRD Provinsi Parpol A. Sebagian Pemilih melakukan *ticket-splitting* dengan memilih Caleg DPRD Provinsi Parpol B. Fenomena *split-ticket voting* terjadi karena Caleg DPRD Provinsi Parpol B menggunakan isu yang sama yang selama ini dilakukan oleh Parpol A di wilayah kecil tersebut. Artinya, Caleg DPRD Provinsi Parpol B menjauh dari isu Partainya dan mengadopsi isu dari Parpol A sebagai strategi mendapatkan suara di wilayah tersebut.

Hipotesis kedua juga terbukti positif karena aktor Parpol dan simpatisan militan Parpol lebih mementingkan Pilpres karena lingkup kekuasaan Eksekutif dianggap lebih tinggi daripada Legislatif.<sup>88</sup> Hal ini

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

sejalan dengan pandangan Karlheinz Reif & Hermann Schmitt, yang menyatakan bahwa karena lebih sedikit yang dipertaruhkan dalam pemilihan tingkat kedua, lebih sedikit Pemilih yang menganggap mereka cukup penting untuk memberikan suaranya.<sup>89</sup>

Samuel Kofi Darkwa menganalisis beberapa alasan lainnya mengapa H2 dapat terjadi, antara lain yaitu:<sup>90</sup>

- 1) Terdapat begitu banyak kompetitor di tingkat lokal untuk memperebutkan posisi Parlemen usungan Parpol, dan ini menciptakan masalah internal. Sebagian besar Elit Parpol lebih memilih menjadi Anggota Parlemen ketimbang menduduki jabatan berdasarkan penunjukan. Ini karena jabatan politik, seperti Menteri, Ketua Dewan, serta Kepala Eksekutif Kota, Metropolitan, dan Distrik (setara dengan Walikota), tidak memiliki jaminan masa jabatan yang didukung oleh Konstitusi. Presiden dapat mengangkat dan memecat kapan saja para Elit Parpol yang menduduki jabatan politik tersebut, sedangkan anggota Parlemen memiliki masa jabatan yang dijamin oleh Konstitusi. Selain itu, Presiden memiliki masa jabatan maksimal selama dua periode, sedangkan anggota Parlemen tidak memiliki batasan maksimal masa jabatan selama rakyat bersedia memilihnya kembali. Hal

---

<sup>89</sup>Karlheinz Reif & Hermann Schmitt. (1980). Nine Second-Order National Elections – A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results. *European Journal of Political Research*, 8(1), hlm. 9.

<sup>90</sup>Samuel Kofi Darkwa. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 76-77.

inilah yang membuat persaingan pencalonan Parlemen menjadi sangat kompetitif dan sengit bahkan di dalam Parpol yang sama.

- 2) Sebelum atau sesudah masa jabatannya berakhir, terdapat beberapa anggota Parlemen terlibat dalam konflik lokal seperti konflik dengan kepala suku dan konflik etnis. Konflik-konflik ini berpusat di lokal, dan oleh karena itu para politisi lokal menderita karenanya.

Contoh untuk memahami H2, misalnya pada Pemilu Serentak tahun 2019 di Indonesia, di mana setiap aktor antar Parpol kurang peduli dengan fenomena *split-ticket voting* pada Pileg DPR di wilayah-wilayah kecil. Namun, setiap Elit Parpol tersebut mendorong terjadinya *straight-ticket voting* pada Pilpres di wilayah kecil tersebut.

Hipotesis ketiga terbukti negatif, namun, beberapa penelitian terkait H3 mengungkap bahwa pencapaian kinerja atau kebijakan ekonomi Presiden di masa lalu berdampak pada terpilihnya kembali atau berdampak kepada peluang Partainya dalam Pemilu berikutnya.<sup>91</sup> Lebih lanjut, Samuel Kofi Darkwa mengungkapkan bahwa Pemilih akan memilih Presiden yang memiliki capaian kinerja atau kebijakan ekonomi yang menyejahterakan rakyatnya, sedangkan jika Calon anggota Parlemen dari Parpol Presiden tidak responsif

---

<sup>91</sup>Emmanuel Debrah. (2016). The Ghanaian Voter and the 2008 General Election. *Politikon, Taylor & Francis*, 43(3), hlm. 379-380; Staffan I. Lindberg. (2013). Have the Cake and Eat It: The Rational Voter in Africa. *Party Politics, SAGE Journals*, 19(6), hlm. 954.

terhadap para rakyatnya.<sup>92</sup> Dalam hal ini, Pemilih akan melakukan *ticket-splitting*. Dengan demikian, melalui *economic voting*, koordinasi Pemilih dapat menyebabkan terjadinya fenomena *split-ticket voting* ketika kinerja atau kebijakan ekonomi Calon Presiden Petahana dipertaruhkan.<sup>93</sup>

Hipotesis keempat terbukti positif karena jika Calon Presiden dan Calon Anggota Parlemen yang layak berasal dari etnis dan Parpol yang sama, maka kemungkinan terjadinya fenomena *split-ticket voting* akan lebih sedikit. Namun, jika Calon Presiden dan Calon Anggota Parlemen yang layak berasal dari etnis yang sama tetapi berbeda Parpol, maka kemungkinan terjadinya fenomena *split-ticket voting* akan meningkat.<sup>94</sup> Dengan demikian, etnisitas merupakan alat koordinasi Pemilih yang menyebabkan terjadinya fenomena *split-ticket voting* atau sebaliknya tergantung dari arah koordinasinya, terutama di antara etnis minoritas.<sup>95</sup>

Dalam kajian kepemiluan, etnisitas merupakan sebuah konsep di mana komunitas/masyarakat etnis tertentu bertindak sebagai Pemilih, yang dalam menentukan pilihannya terhadap kandidat dari Parpol tertentu berdasarkan kesamaan etnis. Para Pemilih tersebut dengan tulus memilih kandidat yang memiliki kesamaan etnis dan terlepas dari perolehan suara pada hasil akhir Pemilu. Dengan

---

<sup>92</sup>Samuel Kofi Darkwa. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 80.

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

<sup>94</sup>*Ibid.*

<sup>95</sup>*Ibid.*

demikian, tidak ada pemungutan suara strategis di antara Pemilih berdasarkan etnis.<sup>96</sup> Demikian halnya dengan konsep klientelisme yang menekankan bahwa etnisitas merupakan satu-satunya kekuatan yang mengarahkan Pemilih untuk memilih kandidat secara tulus.<sup>97</sup>

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Kanchan Chandra yang berdasarkan pada pandangan klasik tentang pemungutan suara berdasarkan etnisitas, di mana menemukan bahwa Pemilih komunitas/masyarakat etnis berdasarkan Kasta di India utara tidak memilih secara tulus untuk Parpol etnis mereka, melainkan memilih secara strategis untuk memastikan bahwa keputusan mereka berdampak pada hasil Pemilu.<sup>98</sup>

Hipotesis kelima (H5A dan H5B) tampaknya merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam faktor demografi & sosial-ekonomi dalam mempengaruhi terjadinya fenomena *split-ticket voting*. Samuel Kofi Darkwa mengungkapkan bahwa variabel demografi & sosial-ekonomi tidak begitu signifikan seperti dalam penelitiannya secara keseluruhan.<sup>99</sup> Analisis kajian literturnya juga menunjukkan bahwa masih banyak hasil penelitian yang saling bertentangan. Misalnya, faktor informasi politik dapat dikatakan bahwa efeknya sebagian besar tidak konsisten, seperti yang ditunjukkan oleh banyak Peneliti

---

<sup>96</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

<sup>97</sup>René Lemarchand. (1972). Political Clientelism and Ethnicity in Tropical Africa: Competing Solidarities in Nation-Building. *American Political Science Review*, 66(1), hlm. 83.

<sup>98</sup>Kanchan Chandra. (2009). Why Voters in Patronage Democracies Split their Tickets: Strategic Voting for Ethnic Parties. *Electoral Studies, Elsevier*, 28(1), hlm. 31-32.

<sup>99</sup>Samuel Kofi Darkwa. (2019). *Loc. Cit.*

lainnya.<sup>100</sup> Karena hubungannya yang tidak konsisten dengan fenomena *split-ticket voting*, masuk akal jika informasi politik yang disebarluaskan melalui berbagai jenis media dapat menjadi alat yang digunakan oleh para aktor Parpol untuk menyebarkan opini publik yang sedang populer pada saat Pemilu guna mempengaruhi pilihan Pemilih ke arah tertentu.<sup>101</sup>

Menganalisis fenomena *split-ticket voting* dalam pendekatan koordinasi strategis level individu memiliki kompleksitasnya tersendiri. Walau demikian, hasil penelitian Samuel Kofi Darkwa (2019) telah memberikan perbedaan yang jelas terkait analisis fenomena *split-ticket voting* antara penelitian yang menggunakan pendekatan koordinasi dengan yang tidak menggunakan pendekatan koordinasi.

Pada level individu, analisis fenomena *split-ticket voting* dalam pendekatan koordinasi mungkin saja mengarah pada tindakan para aktor yang sengaja mendorong terjadinya fenomena *split-ticket voting*. Dalam hal ini, tindakan aktor dinilai sebagai strategi dalam memperoleh suara Pemilih. Selain itu, tindakan para aktor juga dinilai lebih kepada tindakan individual aktor tersebut, dan bukan merupakan hasil koordinasi dengan pengurus Parpol. Dalam hal ini, aktor Parpol melakukan tindakan keluar dari jalur koordinasi internal Parpol dengan mengorganisir sendiri guna mendorong terjadinya fenomena *split-ticket voting*.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 80-81.



Berdasarkan hasil penelitian Samuel Kofi Darkwa (2019), analisis fenomena *split-ticket voting* dalam Pendekatan Koordinasi level individu telah diukur dengan beberapa indikator. Terdapat tiga indikator yang hasilnya terbukti positif, yaitu *strategic/policy balancing*, *(mis)coordination ticket-splitting*, dan etnisitas. Sedangkan indikator *economic voting* dan demografi & sosial-ekonomi yang hasilnya terbukti negatif, walaupun salah satu variabel turunan dari indikator demografi & sosial-ekonomi, yaitu H5B hasilnya terbukti positif.

### **2.2.2 Motif *Split-Ticket Voting***

Faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut secara selektif berperan dalam pengungkapan motif *split-ticket voting*. Berdasarkan latar belakang penelitian, di Indonesia berdasarkan sistem Pemilu yang berlaku, yaitu *open-list proportional representation*<sup>102</sup> telah mengarah pada kompetisi multipartai yang semakin ketat. Efeknya telah sampai pada arah dominasi ‘kandidat’ dibanding ‘Parpol’. Artinya, identitas Parpol semakin kabur. Pertimbangan Peneliti pada akhirnya memfokuskan pada dua motif utama yang diduga terlibat dalam menggambarkan fenomena *split-ticket voting* di Kota Makassar, yaitu motif tulus dan motif strategis.

---

<sup>102</sup>Pemilu di Indonesia telah diselenggarakan dengan sistem *Proportional Representation*. Berdasarkan Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.

## 1. Motif Tulus (*Sincere Motives*)

Asumsi dasar motif tulus adalah pemungutan suara tulus yang mengacu pada tindakan memilih sesuai dengan preferensi, terlepas dari hasilnya.<sup>103</sup> Dalam hal ini, preferensi mencakup dukungan untuk partai, kandidat, atau kebijakan di semua tingkat pemerintahan. Sara Persson menyimpulkan bahwa *split-ticket voting* berdasarkan motif tulus merupakan dukungan elektoral yang diungkapkan untuk beberapa Parpol dan/atau kandidat. Walau demikian, ekspresi suara yang tulus sebagian besar dibentuk oleh konteks Pemilu di mana suara umumnya diberikan kepada kandidat daripada Parpol, efek kandidat jelas lebih menonjol.<sup>104</sup>

Thomas Gschwend & Henk Van Der Kolk merangkum bahwa *split-ticket voting* motif tulus sebagai preferensi Pemilih terjadi ketika Pemilih mendukung sebuah Parpol tetapi dengan tulus lebih memilih menjadi calon konstituen bagi Parpol lainnya (baik karena alasan pribadi atau karena alasan kebijakan).<sup>105</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa efek kandidat memang lebih menonjol daripada efek Parpol. Artinya, Pemilih secara tulus melakukan *ticket-splitting* guna memberikan suaranya kepada kandidat yang mereka sukai, meski bukan berasal dari Parpol yang mereka sukai.

---

<sup>103</sup>Sara Persson. (2020). *Loc. Cit.*; Lihat juga Carolina Plescia. (2017). On the Mismeasurement of Sincere and Strategic Voting in Mixed-Member Electoral Systems. *Electoral Studies, Elsevier, 48*, hlm. 20.

<sup>104</sup>Sara Persson. (2020). *Ibid.*

<sup>105</sup>Thomas Gschwend & Henk van der Kolk. (2006). *Loc. Cit.*

Efek kandidat juga sering dikaitkan dengan beberapa faktor dari kemampuan kandidat dalam membangun hubungan dengan berbagai elemen Pemilih. Identitas kandidat serta kemampuan kandidat dalam mempersonalisasi konten politik merupakan faktor relevan untuk menjelaskan tindakan 'pemilihan personal'.<sup>106</sup> Faktor lain yang menjelaskan efek kandidat mengacu pada preferensi Pemilih terhadap Perwakilan lokal. Namun, perwakilan lokal merupakan faktor yang kurang relevan dalam membangun hubungan personal dengan Pemilih. Dalam hal ini, kemampuan untuk mempromosikan kebijakan lokal merupakan hal yang utama ketimbang mempromosikan identitas pribadi kandidat.<sup>107</sup> Selain itu, keterikatan Pemilih merupakan faktor penting untuk menonjolnya efek kandidat.

Pemilih yang keterikatannya lemah dengan personal kandidat lebih cenderung mempertimbangkan berbagai aspek Pemilu dan melakukan *ticket-splitting* kepada Parpol atau kandidat yang bersaing.<sup>108</sup> Pertimbangan serupa berlaku di semua aspek pemungutan suara yang tulus, karena ikatan politik yang lemah membuat Pemilih lebih cenderung mempertimbangkan berbagai

---

<sup>106</sup>Sara Persson. (2020). *Loc. Cit.*; Lihat juga Carolina Plescia. (2017). *Loc. Cit.*

<sup>107</sup>Sara Persson. (2020). *Ibid.*; Lihat juga Jeffrey A. Karp., *et al.* (2002). Strategic Voting, Party Activity, and Candidate Effects: Testing Explanations for Split Voting in New Zealand's New Mixed System. *Electoral Studies, Elsevier*, 21(1), hlm. 6.

<sup>108</sup>Sara Persson. (2020). *Ibid.*; Lihat juga Jeffrey A. Karp., *et al.* (2002). *Ibid.*, hlm. 4.

aspek politik dan lebih rentan terhadap efek kampanye dan strategi partai.<sup>109</sup>

Selain efek kandidat, efek dukungan terhadap kebijakan, baik sebagai manifestasi dari identifikasi ideologis maupun sebagai dukungan terhadap rancangan dan kebijakan politik juga memberikan pengaruh terhadap fenomena *split-ticket voting* motif tulus.<sup>110</sup> Menurut Maria Solevid & Henrik Oscarsson (2019), pemungutan suara yang tulus berdasarkan dukungan kebijakan seringkali bergantung pada keunggulan isu-isu politik dan seringkali menjadi isu-isu penting.<sup>111</sup>

## 2. Motif Strategis (*Strategic Motives*)

Asumsi dasar motif strategis adalah urutan preferensi calon konstituen identik dengan urutan preferensi Parpol.<sup>112</sup> Dalam hal ini, seorang Pemilih strategis merupakan Pemilih yang memberikan suaranya kepada kandidat atau Parpol lain daripada memberikan suaranya kepada kandidat atau Parpol yang paling disukainya. Dengan demikian, Pemilih strategis berharap dapat mempengaruhi hasil Pemilu dan tidak melakukan tindakan seperti Pemilih tulus. Selain itu, Pemilih melakukan *ticket-splitting* dengan motif strategis karena kandidat yang paling mereka sukai tidak mungkin memenangkan perolehan suara konstituen. Untuk menghindari

---

<sup>109</sup>Sara Persson. (2020). *Ibid.*; Lihat juga Ian McAllister & Stephen White. (2000). Split Ticket Voting in the 1995 Russian Duma Elections. *Electoral Studies, Elsevier*, 19(4), hlm. 574.

<sup>110</sup>Sara Persson. (2020). *Ibid.*

<sup>111</sup>*Ibid.*

<sup>112</sup>Thomas Gschwend & Henk van der Kolk. (2006). *Loc. Cit.*

pemborosan suara, beberapa Pemilih memberikan suara mereka secara strategis kepada kandidat yang paling layak dan disukai.<sup>113</sup>

Fenomena *split-ticket voting* motif strategis dapat mencerminkan beberapa faktor pertimbangan Pemilih saat memilih. *Pertama*, suara yang terbuang merupakan asumsi bagi Pemilih untuk mengelola suaranya dan memilih meninggalkan kandidat atau Parpol yang tidak layak. Dalam hal ini, Pemilih tidak ingin mengambil risiko untuk membuang-buang suaranya.<sup>114</sup> *Kedua*, ambang batas pemilihan digunakan untuk memastikan bahwa Parpol kecil dapat mencapai ambang batas guna mempengaruhi koalisi Parpol dan formasi dalam parlemen.<sup>115</sup> Sebaliknya, Pemilih dapat meninggalkan Parpol yang dinilai jauh dari perolehan ambang batas suara pada Pemilu.<sup>116</sup>

Beberapa motif selain yang disebutkan di atas, tampaknya kurang memadai dalam mengungkap motif *split-ticket voting* dalam konteks sistem proporsional di Indonesia, seperti motif protes, motif koalisi dan motif kebingungan.

Motif protes menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap petahana, partai-partai mapan, dan untuk menantang *status-quo*. Selain itu, Pemilih dengan motif protes juga menunjukkan

---

<sup>113</sup>*Ibid.*, hlm. 165-166.

<sup>114</sup>Sara Persson. (2020). *Loc. Cit.*

<sup>115</sup>Sara Persson. (2020). *Ibid.*; Lihat juga Carolina Plescia. (2017). *Loc. Cit.*

<sup>116</sup>Sara Persson. (2020). *Ibid.*

ketidakpuasan mereka terhadap berbagai aspek politik, misalnya terkait kebijakan dan pemerintah.<sup>117</sup>

Pada akhirnya, Pemilih dengan motif protes lebih mengarahkan pilihannya kepada partai-partai kecil, partai-partai oposisi, dan partai-partai yang spesifik pada isu tunggal. Dalam hal ini, Pemilih dengan motif protes menjadi salah satu indikator dalam menilai keberhasilan dari Parpol tersebut.<sup>118</sup>

Dengan demikian, motif protes lebih mengarah pada Pemilu untuk lingkup kekuasaan eksekutif dan kurang relevan dalam menggambarkan fenomena *split-ticket voting* pada Pemilu untuk lingkup kekuasaan legislatif sebagaimana berdasarkan konteks penelitian ini.

Adapun asumsi dasar motif koalisi adalah mengusung kandidat pada Pemilu di lingkup kekuasaan eksekutif. Koalisi Parpol akan mengusung kandidat yang paling disukai Pemilih.<sup>119</sup> Dalam hal ini, Pemilih secara bersamaan hanya akan memilih Parpol dalam koalisi tersebut pada Pemilu di lingkup kekuasaan legislatif.

Sepintas motif ini dianggap memiliki kesamaan dengan motif strategis, padahal tidak. Perbedaan penting adalah bahwa Pemilih dengan motif koalisi tidak berharap untuk mempengaruhi hasil Pileg

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Thomas Gschwend & Henk van der Kolk. (2006). *Op. Cit.*, hlm. 166.

dengan meninggalkan kandidat atau Parpol yang paling mereka sukai.<sup>120</sup>

Dengan demikian, motif koalisi lebih mengarah pada Pemilu untuk lingkup kekuasaan eksekutif dan kurang relevan dalam menggambarkan fenomena *split-ticket voting* pada Pemilu untuk lingkup kekuasaan legislatif sebagaimana berdasarkan konteks penelitian ini.

Mengenai motif kebingungan, Thomas Gschwend & Henk van der Kolk menekankan motif lainnya, yaitu motif kebingungan (*confusion motives*) yang tidak bisa dianggap remeh.<sup>121</sup> Dalam hal ini, Pemilih melakukan *ticket-splitting* karena kebingungan saja.

Mengacu pada klaim motif kebingungan pemilih (*voter confusion*), Barry C. Burden & Gretchen Helmke (2009) menjelaskan bahwa Pemilih melakukan *ticket-splitting* sebagai langkah kompensasi untuk mengelola kapasitas politik yang rendah dan untuk menyeimbangkan beberapa opsi yang layak.<sup>122</sup>

Motif kebingungan Pemilih sebagai klaim alternatif mengacu pada ketidakpastian terhadap sistem Pemilu sehingga *ticket-splitting* dilakukan untuk mengimbangi kebingungan terhadap prosedur Pemilu.<sup>123</sup> Meskipun terdapat *ticket-splitting* dari Pemilih dengan klaim rasional dan tingkat kecanggihan politik yang tinggi, namun tindakan

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Sara Persson. (2020). *Loc. Cit.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

tersebut mencerminkan kapasitas politik yang tinggi daripada kebingungan dari Pemilih. Dalam hal ini juga terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan *split-ticket voting*. Oleh karena itu, *ticket-splitting* juga menunjukkan tingkat pendidikan dan kepentingan politik yang tinggi bagi Pemilih.<sup>124</sup>

Misalkan motif kebingungan Pemilih (*voter confusion*) mengacu pada langkah kompensasi untuk mengelola kapasitas politik yang rendah. Dalam hal ini terkait dengan rendahnya pemahaman Pemilih terhadap informasi politik, sehingga menyebabkan terjadinya fenomena *split-ticket voting*. Secara umum, motif kebingungan juga terkait dengan Model *Low Information* sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

### **2.2.3 Model *Split-Ticket Voting: Low Information***

Selain motif, tinjauan berikutnya ditujukan pada model *split-ticket voting*, yang juga menggambarkan faktor-faktor Pemilih melakukan *ticket-splitting*. Beberapa model *split-ticket voting* telah dikembangkan dan digunakan dalam berbagai jenis penelitian baik di negara maju maupun di negara berkembang. Peneliti telah meninjau model-model tersebut beserta penjelasannya dan melakukan seleksi model-model apa saja yang relevan dalam menggambarkan *split-ticket voting* untuk lingkup kekuasaan legislatif sebagaimana berdasarkan konteks penelitian ini. Model *split-*

---

<sup>124</sup>*Ibid.*; Lihat juga Jeffrey A. Karp., *et al.* (2002). *Op. Cit.*, hlm. 16-17; Lihat juga Gissur Ó. Erlingsson & Henrik Oscarsson. (2015). *Röstdelning i Sverige*. Dalam Annika Bergström., *et al.* (Eds.), *Fragment* (hlm. 361-376). Swedia: The SOM Institute, University of Gothenburg, hlm. 370.



*ticket voting* yang paling terdekat yang sesuai dengan konteks *split-ticket voting* di Indonesia adalah model *low information*.

Model *low information* diperkenalkan oleh Muhammad Qodari melalui disertasinya yang menggambarkan fenomena *split-ticket voting* pada Pileg dan Pilpres di Indonesia tahun 2014. Model ini dirumuskan setelah menelaah lebih jauh berbagai model yang berkembang saat ini dalam menggambarkan fenomena *split-ticket voting*. Berbagai model yang ada tidak cocok untuk menggambarkan konteks *split-ticket voting* di Indonesia.

Menurut Muhammad Qodari bahwa model demografi & sosial-ekonomi tidak tepat dalam menggambarkan fenomena *split-ticket voting* di Indonesia. Alasan *pertama*, Parpol atau kandidat tidak dibedakan berdasar kelas dan kategori sosial. Misalnya, Parpol yang ditujukan untuk kelompok pemilih tertentu. *Kedua*, Parpol di Indonesia cenderung menjadi “*catch all party*”, artinya Parpol cenderung menangkap semua pihak/tidak secara khusus. *Ketiga*, pada dasarnya pilihan tersebut tidak disebabkan oleh variabel sosiologis dan demografis tapi oleh variabel lainnya.<sup>125</sup>

Adapun model keseimbangan menurut Muhammad Qodari bahwa model ini tidak tepat dalam menggambarkan fenomena *split-ticket voting* di Indonesia. Alasan *pertama*, Parpol yang ada tidak mewakili spektrum ideologi yang ekstrim (kiri vs. kanan). *Kedua*, Parpol yang ada tidak menampilkan spektrum ideologi yang jelas. *Kedua*, Parpol kerap

---

<sup>125</sup>Muhammad Qodari. (2016). *Loc. Cit.*

mengangkat program dan kebijakan yang bertentangan dengan garis ideologi yang ditentukan (pragmatis). Akibatnya, tidak terbentuk identitas ideologi Parpol yang kuat.<sup>126</sup>

Model lainnya adalah model konflik harapan. Tesis utama dari model konflik harapan (Gary C. Jacobson) adalah fenomena *split-ticket voting* terjadi ketika Pemilih berusaha untuk memuaskan keinginan mereka melalui Parpol dan kandidat yang berbeda. Dengan memilih Parpol atau kandidat yang beragam, Pemilih memandang bahwa mereka dapat memenuhi semua kebutuhannya.<sup>127</sup>

Asumsi validitas model konflik harapan adalah *pertama*, Parpol atau kandidat mungkin tidak dapat memenuhi semua harapan Pemilih. Parpol dan kandidat mempunyai kekuatan masing-masing. *Kedua*, Pemilih mengetahui perbedaan program masing-masing Parpol dan kandidat. Kekuatan masing-masing Parpol dan kandidat terkait dengan sejarah di masa lalu.<sup>128</sup> Menurut Muhammad Qodari, model ini tidak tepat dalam menggambarkan fenomena *split-ticket voting* di Indonesia karena *pertama*, Parpol tidak mempunyai kekuatan program atau isu tertentu yang identik dengan Parpol tersebut. Program masing-masing Parpol seringkali malah seragam satu sama lain dan tidak bisa dibedakan secara tegas. *Kedua*, Pemilih tidak bisa membedakan kekuatan program dari masing-masing Parpol dan kandidat.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

Sementara tesis utama model kepemilikan isu (John R. Petrocik) adalah fenomena *split-ticket voting* terjadi karena Pemilih menetapkan standar yang berbeda untuk pemilihan yang berbeda.<sup>130</sup> Ketika memilih presiden, standar atau kriteria yang dipakai adalah terkait isu/masalah politik serta solusi taktisnya. Sebaliknya, ketika memilih anggota legislatif, standar atau kriteria yang dipakai adalah terkait pada sisi kandidat, seperti kepribadian, kompetensi, dan sebagainya.<sup>131</sup> Fenomena *split-ticket voting* terjadi karena pengalaman dan sejarah panjang Parpol, sehingga Parpol tersebut memiliki kekuatannya masing-masing. Misalnya, Parpol tertentu lebih kuat dalam menyosialisasikan isu-isu sehingga bisa memenangkan Pilpres. Di sisi lain, Parpol lain lebih kuat pada sisi anggota Caleg sehingga Parpol tersebut lebih memenangkan Pileg.<sup>132</sup>

Asumsi validitas model kepemilikan isu adalah *pertama*, Parpol mempunyai sumber kekuatan yang berbeda. Misalnya, ada Parpol yang identik dengan isu tertentu yang disukai oleh Pemilih. Sementara Parpol lain dalam mengukung Caleg tertentu memiliki kemampuan personal yang sangat memadai. *Kedua*, Pemilih secara rasional melakukan *ticket-splitting* berdasarkan perbedaan kriteria atau dasar antara Pileg dengan Pilpres.<sup>133</sup> Menurut Muhammad Qodari, model ini tidak tepat dalam menggambarkan fenomena *split-ticket voting* di Indonesia karena *pertama*, Pemilih tidak membedakan Pileg dan Pilpres sebagai dua jenis

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 190-191.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 190-191.

Pemilu yang terpisah. *Kedua*, Pertimbangan Pemilih dalam memilih Caleg dan Capres relatif sama. Pemilih tidak menetapkan standar atau kriteria yang berbeda untuk jenis Pemilu yang berbeda. *Ketiga*, tidak/belum terbangun “kepemilikan isu” dalam sistem dan tradisi kepartaian di Indonesia.<sup>134</sup>

Model lainnya yang juga digambarkan Mohammad Qodari adalah model *check & balance*. Tesis utamanya adalah fenomena *split-ticket voting* terjadi karena Pemilih pada dasarnya menginginkan terjadinya keseimbangan (ekuilibrium), tidak ingin kekuasaan didominasi oleh Parpol tertentu saja. Pemilih secara sengaja melakukan *ticket-splitting* agar lingkup kekuasaan, khususnya legislatif dan eksekutif tidak berada di tangan satu Parpol.<sup>135</sup>

Asumsi validitas model *check & balance* adalah *pertama*, terdapat Parpol penguasa (pemerintah) dan Parpol oposisi. *Kedua*, Pemilih menginginkan terjadinya pembagian kekuasaan. Selain itu, Pemilih tidak ingin lingkup kekuasaan yang berbeda berada di tangan satu Parpol. Oleh karena itu, *ticket-splitting* adalah upaya Pemilih untuk menciptakan *check & balance*.<sup>136</sup> Menurut Muhammad Qodari, model ini tidak tepat dalam menggambarkan fenomena *split-ticket voting* di Indonesia karena *pertama*, masih kuatnya pandangan “integralistik” di kalangan Pemilih Indonesia yang menginginkan adanya kekuatan tunggal dalam Politik.

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

<sup>136</sup> *Ibid.*

*Kedua*, Pemilih Indonesia menganggap “oposisi” bukan sesuatu yang baik. Oposisi dilihat sebagai konflik, tidak harmonis.<sup>137</sup>

Tesis utama model *low information* adalah fenomena *split-ticket voting* terjadi bukan akibat intensi (kesengajaan) dan pertimbangan rasional dari Pemilih. *Ticket-splitting* terjadi akibat “*cues*”, sesuatu yang mencolok seperti kedekatan Pemilih dengan Parpol dan kesukaan dengan kandidat. Pemilih memilih Caleg dari Parpol X, dan memilih Capres dari Parpol Y karena Pemilih menyukai kandidat tersebut. Pilihan itu bukan karena pertimbangan rasional atau strategi elektoral.<sup>138</sup>

Asumsi validitas model *low information* adalah *pertama*, pengetahuan Pemilih pada Parpol dan kandidat relatif rendah, sehingga tidak bisa membedakan program dan kekuatan Parpol dan kandidat. *Kedua*, keterlibatan Pemilih juga relatif rendah (*low involvement*). *Ketiga*, tingginya faktor ketokohan, seperti kesukaan Pemilih pada kandidat tertentu.<sup>139</sup>

Model *low information* dirumuskan berdasarkan wawasan dari kajian-kajian di dunia persuasi.<sup>140</sup> Oleh karena itu, Muhammad Qodari membagi Pemilih ke dalam dua kategori, yakni Pemilih dengan kategori *high information* dan Pemilih dengan kategori *low information*. Pemilih dengan kategori *high information* dicirikan sebagai berikut. *Pertama*, Pemilih mempunyai basis pengetahuan yang cukup sebagai bahan dalam

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

mengolah pesan. *Kedua*, Pemilih mempunyai keinginan dan kemampuan dalam mengolah pesan.<sup>141</sup> Ciri tersebut ditandai dengan upaya Pemilih untuk menimbang-nimbang informasi, membuat perbandingan, dan mengambil keputusan berdasar hasil pertimbangan dan perbandingan tersebut. Jika konsep *high information* ini ditarik dalam ranah perilaku pemilih, Pemilih dengan kategori *high information* mempunyai pengetahuan dan keterlibatan yang cukup. Dalam hal ini, Pemilih dalam menentukan pilihannya didasarkan pada pertimbangan rasional, yaitu membandingkan kekuatan satu Parpol dengan Parpol lain.

Sementara pemilih dengan kategori *low information* dicirikan sebagai berikut. *Pertama*, tingkat pengetahuan Pemilih rendah serta tidak mengetahui secara persis isu yang diperbincangkan. *Kedua*, Pemilih tidak melakukan proses pengolahan pesan.<sup>142</sup> Ciri tersebut ditandai ketika Pemilih membuat pilihan, yang tidak didasarkan pada pertimbangan berupa membandingkan satu informasi dengan informasi lainnya. Dalam hal ini, Pemilih tidak membandingkan kelebihan dan kelemahan satu Parpol dengan Parpol lainnya, dan seterusnya.

Fenomena *split-ticket voting* model *low information* ditandai oleh pilihan berdasar penampakan yang mencolok (*cues*). Artinya, *ticket-splitting* yang terjadi merupakan proses non-intensional di mana Pemilih banyak menggunakan *cues* dalam mengambil keputusan (jalur peripheral). Sesuatu yang mencolok (*cues*) yang tinggal diserap dan

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>142</sup> *Ibid.*

langsung menjadi landasan tanpa harus menggunakan penalaran yang kompleks untuk memilih adalah kedekatan Pemilih pada Parpol (*Party ID*) dan kesukaannya pada kandidat. *Party ID* menjadi variabel yang berpengaruh dalam fenomena *split-ticket voting* karena identifikasi Parpol menjadi *cues* bagi Pemilih *low information*. Pemilih sebagai *Party ID* akan cenderung memilih kandidat dari satu Parpol untuk lingkup kekuasaan dan tingkatan yang berbeda.<sup>143</sup>

*Cues* berikutnya adalah pamor (bagian dari evaluasi kandidat) yang memainkan peran lebih besar dalam proses *split-ticket voting*. Evaluasi kandidat menjadi variabel yang semakin kuat dalam sistem politik dengan *Party ID* rendah, seperti di Indonesia. Di tengah kebingungan atas ideologi politik yang tidak jelas, minimnya kepemilikan isu antara Pileg dan Pilpres, serta program kerja yang sulit dibedakan, maka faktor evaluasi kandidat – kemampuannya dan kepribadiannya seperti kepintaran, kejujuran, ketegasan, dan kepedulian pada masyarakat– menjadi *cues* yang memandu Pemilih Indonesia.<sup>144</sup>

### **2.3 Penelitian yang Relevan**

Upaya Peneliti untuk menemukan perbandingan dan lebih jauh mengungkap ide-ide baru, maka Peneliti akan menguraikan dan menyajikan ringkasan beberapa hasil penelitian terdahulu dan keterkaitannya dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 196-197.

1. Barry Ames., *et al.* (2009). *Split-Ticket Voting as the Rule: Voters and Permanent Divided Government in Brazil. Electoral Studies, Elsevier, 28(1)*, hlm. 8-20.

Penelitian ini mengkaji fenomena *split-ticket voting* antara Pemilu Wakil Negara Federal Minas Gerais dan Rio Grande do Sul dengan Pilpres Brazil Tahun 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% Pemilih melakukan *ticket-splitting* pada Pemilu Serentak Brazil Tahun 2002. Pemilih lebih mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik pribadi Calon Wakil Negara Federal dalam membangun fasilitas publik di tingkatan lokal. Adapun kebijakan tingkat nasional hanya menjadi pembicaraan sekunder. Hampir tidak ditemukan bahwa Pemilih melakukan tindakan strategis dalam melakukan *ticket-splitting*. Pemilih hanya tidak mau dipersulit dengan memberikan suara untuk usungan Parpol yang sama di lingkup kekuasaan yang berbeda.

2. Janelle Middents. (2010). "Understanding the Split-Ticket Voter". *Tesis*. University of Central Florida, Florida.

Penelitian ini mengkaji fenomena *split-ticket voting* antara Pemilu DPR dengan Pilpres di Amerika Serikat Tahun 2004 dan 2008. Hasil penelitian berdasarkan tiga variabel, yaitu demografis, sikap, dan sistem menunjukkan bahwa fenomena *split-ticket voting* antara Pemilu tahun 2004 dan 2008 tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Secara keseluruhan, variabel demografis dan sikap terbukti menjadi



indikator yang relatif konsisten dalam mendorong fenomena split-ticket voting. Adapun variabel sistem Pemilu juga terbukti menjadi faktor bagi Pemilih melakukan ticket-splitting di beberapa tingkatan. Selain itu, karakteristik demografis personal dan Party ID juga menjadi pertimbangan Pemilih melakukan ticket-splitting pada lingkup kekuasaan eksekutif dan legislatif. Variabel demografis pada akhirnya memiliki kontribusi dalam membentuk keyakinan politik Pemilih. Sementara itu, variabel sikap menjadi faktor penentu bagi Pemilih dalam melakukan ticket-splitting pada Pemilu DPR dan Pilpres di Amerika Serikat Tahun 2004 dan 2008

3. Thomas Gschwend & Henk van der Kolk. (2006). Split Ticket Voting in Mixed Member Proportional Systems: The Hypothetical Case of the Netherlands. *Acta Politica, Palgrave Macmillan*, 41, hlm. 163-179.

Penelitian ini mengkaji fenomena *split-ticket voting* pada Pemilu lingkup kekuasaan legislatif berdasarkan *Sistem Mixed Member Proportional* (MMP) di Belanda Tahun 1998, 2002, dan 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30% Pemilih melakukan *ticket-splitting* pada Pemilu lingkup kekuasaan legislatif berdasarkan Sistem MMP di Belanda. Secara keseluruhan, terdapat banyak faktor terkait dengan perilaku Parpol, kandidat, dan Pemilih yang mempengaruhi terjadinya fenomena *split-ticket voting*. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan antara sistem MMP dengan sistem *Single Member Districts* (SMD). Dalam hal ini, jika sistem SMD diterapkan di Belanda,

maka fenomena *split-ticket voting* bisa lebih ditekan. Adapun fenomena *split-ticket voting* pada dasarnya tidak memiliki konsekwensi jika sistem MMP masih diterapkan di Belanda.

4. Muhammad Qodari. (2016). "*Split-Ticket Voting* dan Faktor-Faktor yang Menjelaskannya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2014". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Penelitian ini mengkaji fenomena *split-ticket voting* antara Pileg dengan Pilpres Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *split-ticket voting* ini sering terjadi pada Pemilu Indonesia pasca Orde Baru. Di Amerika Serikat dan Eropa, studi tentang *split-ticket voting* telah ada sejak lama dan sebagai hasilnya, beberapa teori dominan telah dikembangkan. Setidaknya ada lima teori dominan yang menjelaskan terjadinya fenomena *split-ticket voting*, yaitu teori keseimbangan, teori konflik harapan, teori kepemilikan isu, teori *check and balance*, dan teori pemasaran politik. Selain itu, meskipun motivasi Pemilih berbeda-beda, yang menyatukan semua teori adalah Pemilih dianggap memiliki pengetahuan yang cukup, kemampuan yang cukup, dan melakukan *ticket-splitting* atas dasar niat tertentu. Akan tetapi karena konteks yang berbeda, teori-teori ini dianggap kurang relevan untuk negara berkembang dan demokrasi muda seperti Indonesia. Oleh karena itu, sebuah model yang disebut

dengan *model low information* telah dirumuskan dan cukup baik dalam menjelaskan perilaku *ticket-splitting* di Indonesia pada Pemilu 2014.

5. Samuel Kofi Darkwa. (2019). "A Coordination-Based Approach to Subnational Variations in Split-Ticket Voting: The Case of Ghana 1996-2016". *Disertasi*. West Virginia University, Morgantown.

Penelitian ini mengkaji fenomena *split-ticket voting* antara Pileg dengan Pilpres Ghana Tahun 1996-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Pemilih melakukan *ticket-splitting* dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam lingkungan politik, yaitu pada level individu, level konstituen, dan level elit. Faktor pada level individu (karakteristik demografis dan variabel informasi politik) kurang mampu menjelaskan fenomena *split-ticket voting*. Selain hubungan yang lemah secara statistik terkait tindakan Pemilih melakukan *ticket-splitting*, Pemilih juga tidak konsisten dalam menjelaskan fenomena tersebut. Namun, faktor terpenting yang mendorong terjadinya fenomena *split-ticket voting*, yaitu beroperasi pada level elit dan didasarkan pada koordinasi strategis. Indikator-indikator keberhasilan dan kegagalan koordinasi strategis Intra dan Inter-Parpol merupakan prediktor terbaik terjadinya perilaku *ticket-splitting*. Selain itu, lebih baik menganalisis fenomena *split-ticket voting* berdasarkan pendekatan *Koordinasi Strategis* daripada berdasarkan pada faktor karakteristik perilaku memilih sebagaimana studi-studi *mainstream* tentang fenomena *split-ticket voting* pada Pemilu.

6. Sara Persson. (2020). Exploring Split Ticket Voting Motives. Dalam *Swedish National Election Studies Program Report Series 2020: 14*. Swedia: Department of Political Science, University of Gothenburg.

Penelitian ini mengkaji fenomena *split-ticket voting* pada Pemilu lingkup kekuasaan legislatif di Swedia Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30% Pemilih melakukan *ticket-splitting* pada Pemilu lingkup kekuasaan legislatif. Secara keseluruhan, dominan Pemilih melakukan *ticket-splitting* secara tulus. Kondisi ini kemungkinan merupakan efek dari sistem Pemilu dan iklim perpolitikan di Swedia. Di sisi lain, meskipun kurang signifikan, tindakan strategis juga merupakan motif Pemilih melakukan *ticket-splitting*. Dalam konteks Swedia, pertimbangan strategis yang relevan bagi Pemilih mengacu pada ambang batas pemilihan dan suara dapat digunakan untuk mempertimbangkan Parpol yang memiliki peluang untuk memenuhi persyaratan ambang batas. Temuan penting lainnya adalah adanya perbedaan Pemilih berdasarkan motifnya masing-masing. Yang paling menonjol, ada perbedaan yang jelas antara Pemilih berdasarkan motif strategis dengan motif lainnya. Dalam hal ini, kelompok yang lebih muda lebih cenderung melakukan pertimbangan strategis daripada kelompok yang lebih tua. Pemilih di kota-kota besar lebih cenderung melakukan *ticket-splitting* berdasarkan motif strategis daripada Pemilih di daerah. Demikian pula, Pemilih dengan preferensi aliran politik kiri lebih cenderung ke

arah motif strategis daripada Pemilih dengan preferensi aliran politik tengah dan kanan. Lebih lanjut, motif tulus dan protes menunjukkan sedikit perbedaan. Dalam hal ini, hanya kelompok termuda dan tertua yang berbeda secara statistik, dan kelompok tertua lebih cenderung pada motif tulus dan protes. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan di antara Pemilih dalam melakukan *ticket-splitting* berdasarkan motif memilih mereka.

**Tabel 2.2 Perbandingan antar Penelitian**

No.	Peneliti	Indikator Perbandingan <i>Split-Ticket Voting</i>	
		Faktor <i>Ticket-Splitting</i>	Lingkup Kekuasaan
1.	Barry Ames., <i>et al.</i>	Motif Tulus	Berbeda
2.	Janelle Middents	Perilaku Tingkat Individu/Sikap Pemilih	Berbeda
3.	Thomas Gschwend & Henk van der Kolk	Motif Strategis	Sama
4.	Muhammad Qodari	Model <i>Low Information</i>	Berbeda
5.	Samuel Kofi Darkwa	Model <i>Strategic Voting</i>	Berbeda
6.	Sara Persson	Motif Tulus dan Strategis	Sama

Sumber: Data Diolah dari Hasil Penelitian Terdahulu.

Dari ringkasan data tabel di atas, empat dari enam penelitian terdahulu mengkaji *split-ticket voting* pada lingkup kekuasaan yang berbeda. Sedangkan penelitian Thomas Gschwend & Henk van der Kolk (2006) dan Sara Persson (2020) memiliki kesamaan dengan penelitian ini di mana mengkaji fenomena *split-ticket voting* pada lingkup kekuasaan yang sama, yaitu Pileg. Adapun faktor dari penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian Peneliti. Dalam hal ini, Peneliti mempertimbangkan setiap faktor dari motif maupun model *split-ticket voting* dari penelitian terdahulu. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penentu yang paling dominan untuk

menggambarkan fenomena *split-ticket voting* pada Pileg DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar, yang terdiri dari:

1. Motif *split-ticket voting* penentu didasarkan pada analisis motif tulus, dan motif strategis.
2. Model *split-ticket voting* penentu didasarkan pada analisis model *strategic voting*, model *low information*, dan model pemasaran politik.

Dari fokus penelitian Peneliti, khususnya dalam konteks fenomena *split-ticket voting* pada lingkup kekuasaan yang sama, yaitu Pileg di Indonesia. Dalam hal ini, Peneliti dapat menekankan bahwa terdapat kebaruan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Pada bagian pendahuluan penelitian ini, telah dideskripsikan secara sederhana data persentase *split-ticket voting* berdasarkan hasil perolehan suara pada Pileg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 – DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1-4. Secara kuantitatif, jelas terdapat fenomena *split-ticket voting* pada Pileg DPR tersebut. Peneliti melakukan penyeleksian lebih lanjut, dan hasilnya adalah Kota Makassar merupakan wilayah dimana sangat banyak Pemilih melakukan *ticket-splitting* (berdasarkan nominal jumlah Pemilih). Dengan demikian, fenomena *split-ticket voting* dalam penelitian ini dimaksudkan guna menganalisis tindakan Pemilih yang melakukan *ticket-splitting* pada Pileg DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar.

Berdasarkan studi literatur dan tinjauan penelitian terdahulu, Peneliti telah melakukan penelusuran, penyesuaian, dan mengelompokkan faktor-faktor yang menjelaskan fenomena *split-ticket voting*. Penelusuran dilakukan dengan meninjau literatur yang membahas tentang motif *split-ticket voting* dan model *split-ticket voting*. Penyesuaian dilakukan agar fenomena *split-ticket voting* untuk lingkup kekuasaan yang sama, yaitu legislatif dapat dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Adapun faktor-faktor yang menjelaskan lingkup kekuasaan eksekutif akan dihilangkan atau disesuaikan dengan konteks lingkup kekuasaan legislatif. Pengelompokan faktor-faktor dilakukan dengan cara memilah dan memilih berdasarkan pertimbangan konteks penelitian fenomena *split-ticket voting* di Kota Makassar. Pengelompokan dimulai dari meninjau motif *split-ticket voting* dan model *split-ticket voting*. Kemudian dilakukan pengelompokan untuk menyusun kembali faktor-faktor yang menjelaskan fenomena *split-ticket voting* pada Pileg DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar.

Studi literatur terhadap motif dan model *split-ticket voting*, telah membawa Peneliti untuk mengikuti pola umum faktor-faktor yang menggambarkan *split-ticket voting* oleh Thomas Gschwend & Henk van der Kolk yang membedakan antara dua set faktor. Set pertama terkait dengan sisi Parpol dan kandidat. Set kedua terkait dengan sisi Pemilih. Dua set faktor dilengkapi dengan studi literatur motif dan model *split-ticket voting* lainnya dengan cara menyesuaikan faktor-faktor yang sudah ada

dan menambahkan faktor-faktor yang belum ada dalam pola umum tersebut.

Faktor umum pertama dianalisis berdasarkan kategori keputusan parpol dan gaya kampanye. Keputusan Parpol adalah tindakan Parpol dalam memutuskan apakah mereka akan mengusung Caleg di daerah pemilihan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Parpol, yaitu efek kontaminasi, biaya partisipasi, dan ketersediaan kandidat.

Efek kontaminasi adalah efek peningkatan perolehan suara melalui daftar usungan kandidat yang mumpuni pada kontes Pileg. Jika efek kontaminasinya besar, Parpol akan memiliki insentif untuk mengusung kandidat di sebanyak mungkin Dapil untuk memanfaatkan efek ini. Biaya partisipasi adalah kesiapan Parpol dalam ketersediaan dana operasional dari serangkaian kegiatan Pileg. Ketersediaan kandidat adalah jumlah Caleg di satu Parpol sesuai dengan jumlah kuota berdasarkan Dapil di tingkatan masing-masing.

Kategori kedua adalah gaya kampanye, yaitu pilihan Caleg Parpol dapat memilih gaya kampanye yang berpusat pada kepribadiannya atau berpusat pada platform Parpol ataupun kedua-duanya. Jika Caleg lebih dominan melakukan kampanye secara pribadi, itu akan mendorong *split-ticket voting*.

Faktor umum kedua adalah sisi Pemilih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih melakukan *ticket-splitting*, yaitu kekuatan keberpihakan (*strength of partisanship*); informasi jabatan (*incumbency*);



*strategic/policy balancing*; dan kampanye di sisi Pemilih. Faktor kekuatan keberpihakan dianalisis berdasarkan kedekatan dan keterkaitan pemilih dengan Parpol tertentu (*party ID*). Faktor ini disesuaikan berdasarkan model *low information*.

Faktor informasi jabatan adalah pamor, kemampuan, dan catatan layanan Caleg sehingga menjadi faktor bagi pemilih dalam *split-ticket voting*. Faktor ini disesuaikan berdasarkan model *low information*. Faktor *strategic/policy balancing* didasarkan pada analisis Caleg yang meningkatkan persepsi Pemilih tentang kesamaan di mana Caleg atau Parpol bergerak lebih dekat ke platform Parpol lainnya sehingga mempengaruhi terjadinya *split-ticket voting*. Faktor ini disesuaikan berdasarkan model *strategic voting*. Faktor kampanye di sisi Pemilih didasarkan pada analisis motivasi Pemilih dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Caleg. Faktor ini dikaitkan dengan model *strategic voting*.

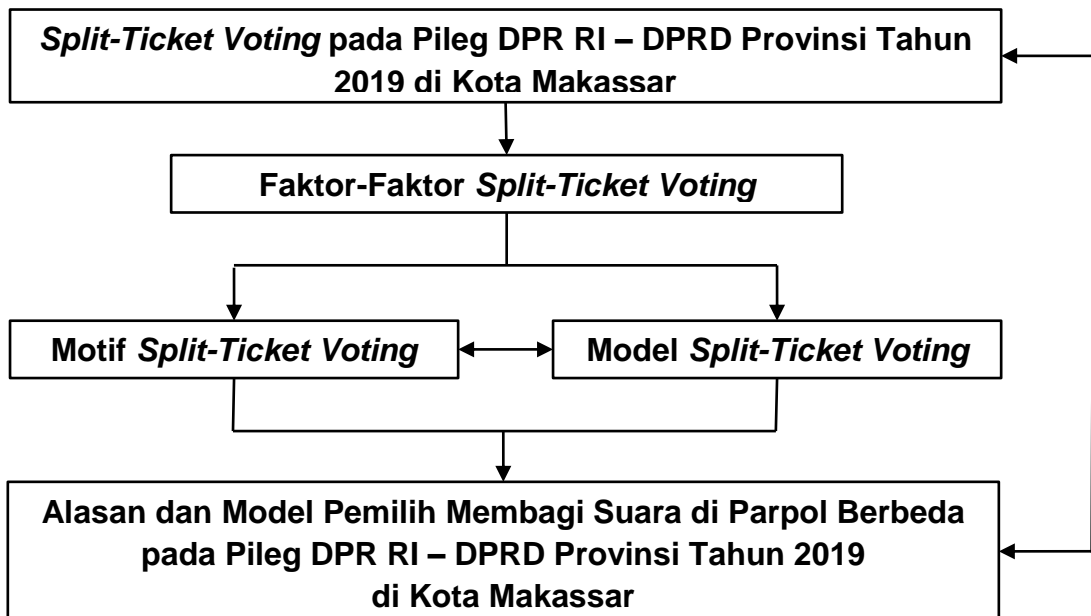
Faktor-faktor *ticket-splitting* Pemilih yang telah dipaparkan menjadi landasan Peneliti dalam menguraikan fenomena *split-ticket voting* pada Pileg DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar (menjawab rumusan masalah pertama). Dari uraian faktor-faktor tersebut menghasilkan motif dan model yang menggambarkan *ticket-splitting* Pemilih pada Pileg DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar (menjawab rumusan masalah kedua).

Motif *split-ticket voting* penentu didasarkan pada gambaran motif tulus, motif strategis, dan motif kebingungan yang paling dominan menentukan *split-ticket voting* pada Pileg DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar. Motif tulus adalah preferensi Pemilih yang terjadi jika seorang pemilih mendukung sebuah Parpol tetapi dengan tulus lebih memilih Caleg dari Parpol lain (baik karena alasan pribadi atau karena alasan kebijakan). Motif strategis adalah *split-ticket voting* pada pemilih karena Caleg yang paling disukai tidak mungkin memenangkan kursi konstituen. Motif kebingungan adalah rendahnya pemahaman pemilih terhadap informasi politik sehingga menyebabkan *split-ticket voting*. Motif kebingungan didasarkan sesuai model *low information*.

Model *strategic voting* adalah terjadinya *split-ticket voting* karena pemilih mendukung Caleg pilihan kedua karena persepsi bahwa mereka memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan pemilihan daripada yang dipilih pertama. Model *low information*, yaitu *split-ticket voting* terjadi bukan akibat intensi (kesengajaan) dan pertimbangan rasional dari pemilih, melainkan terjadi akibat “cues”, sesuatu yang mencolok seperti kedekatan pada partai dan kesukaan pada kandidat. Sementara model pemasaran politik adalah *split-ticket voting* terjadi karena pemilih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan marketing dan bermuara pada pemahaman kognitif.

Indikator-indikator tersebut menggambarkan fenomena *split-ticket voting* di Kota Makassar dalam lingkup kekuasaan yang sama, yaitu

legislatif. Pada akhirnya, hasil analisis menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor yang menggambarkan terjadinya *split-ticket voting* sehingga juga memberikan penjelasan tentang motif dan model *split-ticket voting* pada Pileg DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar.



Gambar 2.1 Skema Pemikiran